



PERMASALAHAN DAERAH BIDANG STATISTIK SOSIAL

- 1. Direktorat Statistik Kependudukan**
- 2. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat**
- 3. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial**

Catatan Mengenai Permasalahan Daerah

1. Buku ini merupakan kumpulan Permasalahan Daerah yang dikirim oleh BPS Propinsi. Kumpulan permasalahan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi daerah pada waktu menghadapi suatu masalah, karena didalamnya dicakup juga pemecahan masalah yang disarankan oleh BPS. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berguna bagi Propinsi yang menyampaikan permasalahan, tetapi juga bagi propinsi lain yang tidak menyampaikannya. Dengan kata lain buku ini dapat berfungsi sebagai buku referensi.
2. Namun harus diakui bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan agar buku referensi ini menjadi lebih baik. Utamanya mengenai uraian permasalahan itu sendiri, sehingga bersifat strategis, substansial, dan jelas. Karena dalam buku ini permasalahan yang dikemukakan tidak demikian. Ada daerah yang sekedar menyampaikan permasalahan, karena tidak ingin daerahnya dianggap tidak mempunyai masalah. Bahkan ada daerah yang menyampaikan "Keinginannya", bukan "Permasalahan".
3. Untuk membuat buku seperti ini lebih baik di tahun-tahun yang akan datang, sebaiknya BPS Propinsi mendokumentasikan permasalahan yang dihadapi dalam buku catatan permasalahan pada saat hal tersebut terjadi. Demikian juga Direktorat/ Biro di Pusat perlu juga membuat catatan-catatan mengenai permasalahan, dan bagaimana permasalahan dipecahkan. Sehingga pada waktu Raker, permasalahan sudah terdokumentasi dengan kualitas permasalahan yang strategis, dan pemecahan yang operasional (tidak mengambang).
4. Untuk memudahkan pencarian informasi dalam buku ini, permasalahan dikelompokkan menurut Propinsi dengan nomor Propinsi. Dimulai dari 11 (Nanggroe Aceh Darussaalam), dan seterusnya. Masing-masing pertanyaan pada setiap Propinsi dimulai dari nomor 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, untuk membantu pembaca mencari masalah sesuai dengan topik permasalahan, di halaman depan ditambahkan Daftar Isi Permasalahan dengan indeks dimana permasalahan berada. Alamat permasalahan adalah : (Nomor Propinsi dan Nomor Pertanyaan). Contoh : Alamat (53.2) artinya permasalahan berasal dari Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Nomor urut pertanyaan adalah 2.

Selamat menggunakan.

Tim Perumus Ratak

Daftar Isi Permasalahan Bidang Statistik Sosial

Jenis Masalah	Provinsi dan Nomor Pertanyaan
(1)	(2)
1. Ketahanan Sosial	
a. Podes	(34.4);(52.2);(61.15);(61.16);(64.9);(72.8);(82.5); (61.14);(12.5)
b. Status Lingkungan Hidup Daerah	(52.1)
d. Pemasukan Dokumen	(61.17)
e. Dana	(61.18);(75.2);(13.7);(91.4)
e. Kriminalitas	(61.19);(74.3);(63.7);(82.14)
f. Seksi Hansos	(16.1);(74.1)
g. Jumlah Kelas PDL dan PML	(12.7)
P4B	
h. Sosialisasi P4B	(12.8);(13.7);(16.10);(31.4);(32.2);(32.4);(61.7a)
i. Petugas Lapangan	(12.9);(13.7);(15.1);(16.6);(31.7);(31.12);(32.6);(61.7a);(72.10); (74.17a,b);(74.19);(82.1)
j. Hambatan di Lapangan	(12.10a-d);(13.7);(16.11); (74.6);(32.3);(74.17d);(12.10f)
k. Kuesioner	(15.4);(15.5);(16.9);(32.5);(12.10e);(64.2);(74.17c)
l. Jumlah Dokumen	(12.11);(13.7);(15.1);(16.8);(31.11);(32.1);(61.7a);(64.1);(72.11); (74.7);(74.18);(82.2);(82.3);(82.4)
m. Dokumen Terlambat dikirim ke Daerah	(16.7)
n. Jadwal	(31.3);(31.8);(31.9);(61.7a);(74.16); (15.2)
o. Daerah Elit	(31.9);(31.5);(32.2)
p. Wilayah	(15.3); (32.9);(64.4); (13.6);(16.5);(32.8) (32.7)
2. Kependudukan	
a. Proyeksi Penduduk/Jumlah Penduduk	(34.3);(61.13) ;(13.2);(72.1);(72.4)
b. SP2000	(36.2)
c. SDKI	(61.6); (61.5)
d. Jumlah Penduduk	
e. SDM	(91.3);(91.5)
f. Sakernas	(19.2);(33.4);(61.9);(61.11);(61.12);(63.2);(64.10);(64.11);(71.4); (73.5);(74.12); (61.10)
g. Sampel	(11.1);(12.2);(16.3);(33.3);(36.4);(53.2);(62.5); (74.3)
h. Registrasi Penduduk	(11.2);(13.5);(34.2);(52.7);(63.1);(71.3);(72.2);(74.2);(74.14); (74.15);(75.2); (81.1);(82.11)
i. Survei Upah/ Struktur Upah	(12.4);(32.10);(33.5);(52.6);(61.8);(63.3);(71.2); (74.13) (31.1)
j. Parameter Demografi	(17.3);(82.12)
k. Indikator Kemiskinan	(14.1);(14.2);(62.3);(73.3)
l. Indikator Sosial	(19.2);(36.3);(62.2);(82.13);(82.15)
3. Kesejahteraan Rakyat	
a. Data Clean	(13.1);(16.2);(52.6);(72.6);(75.1);(91.2)
b. Jadwal	(14.3);(17.1);(33.6)
c. Dokumen	(17.2) (13.4) (82.10)
d. Validasi	(32.12) (33.7);(71.1a);(75.3);(82.7)
e. Pembayaran	(32.13);(33.8);(34.5a);(52.5);(61.1);(63.5);(12.1);(72.5);(72.7); (74.12)
f. Sampel	(33.1);(52.3);(52.4);(53.1);(61.2);(61.3);(64.7); (73.1);(91.1)
g. Blanko Lewat E-mail	(33.2)
h. Pengolahan	(33.9);(34.5d);(34.5e);(63.6);(12.6);(64.8);(71.1b); (82.8);(82.9); (34.5c)

Jenis Masalah	Provinsi dan Nomor Pertanyaan
(1)	(2)
j. Innas	(53.3)
k. Biaya Pelatihan Pengolahan	(53.4)
l. Wilayah	(61.4) (71.1c)
m. Pengawasan	(63.4)
n. Item Pertanyaan	(12.3)
o. Petugas	(74.4);(82.6)
4. Umum	
a. Dokumen survei Terlambat ke Daerah	(16.4);(74.11)
b. Data Sekunder	(17.4);(72.3);(75.2)
c. Jadwal Waktu	(19.1);(32.11);(34.1);(64.5)
d. Blok Sensus	(31.2);(31.6) (31.10)
e. Petugas	(13.3) (62.4) (74.8)
f. Informasi Statistik	(36.1)
g. Sarana Komputer	(11.3)
h. Pengawasan	(62.1)
i. Biaya	(14.4);(64.3) (73.2) (74.10) (91.6)
j. Lokasi Sulit	(72.9)

PERMASALAHAN DAERAH BIDANG STATISTIK SOSIAL

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
11. Nangroe Aceh Darussalam			
1.	Pergantian sampel survei (Susenas, Sakernas, Survei Upah Buruh, Survei Struktur Upah). Karena masalah tertentu seringkali sampel yang sudah ditentukan BPS Pusat tidak mungkin dilaksanakan pencacahan. Disamping kondisi keamanan yang tidak memungkinkan, juga kemungkinan sampel tersebut sudah tidak ada di lapangan.	BPS Provinsi NAD akan mengkonfirmasi pergantian sampel kepada BPS Pusat dengan aturan yang telah ditentukan. Namun jika saat pencacahan ada sampel yang ternyata karena situasi tertentu, harus diganti/diganti kembali maka BPS Kabupaten/Kota boleh menggantinya dan mengkonfirmasi (disetujui) BPS Provinsi sesuai aturan yang ditentukan untuk selanjutnya disampaikan ke BPS Pusat. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi di wilayah Provinsi NAD pada saat ini, seperti pengungsian, pembakaran, dll.	Ya, sepanjang mengikuti prosedur yang ada
2.	Pelaksanaan Registrasi Penduduk di kecamatan pedalaman sering terlambat, karena petugas kecamatan takut ke lapangan menghubungi Kepala Desa dan Kepala Desa sendiri takut memberi data karena adanya intimidasi pihak tertentu.	Tetap dilaksanakan, walaupun pemasukan laporannya terlambat.	
	Pengumpulan data Registrasi Penduduk selama 2 tahun terakhir tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari hasil evaluasi dan laporan dari BPS Kabupaten/Kota, hal ini disebabkan oleh rendahnya honor/upah pencacahan.	Direncanakan pada tahun anggaran 2004 akan dimasukkan sebagai salah satu kegiatan pada Proyek P2S Daerah dengan <i>rate</i> upah antara Rp 500-1000 per desa.	
3.	Sarana komputer, yang ada 3 unit komputer digital (2 aktif, 1 monitor rusak).	Jatah komputer untuk BPS NAD segera dikirimkan.	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
12. Sumatera Utara			
1.	Keterlambatan Upah Pen-bayaran Susenas 2003, akan berpengaruh pada survey lain yang melibatkan mitra	Waktu pelaksanaan lapangan digeser, misalnya pertengahan tahun, yang memungkinkan anggaran sudah cair	Dipertimbangkan
2.	Sampel terpilih Susenas dan Sakernas selalu berulang, sehingga responden jenuh.	Rancangan sampel lebih menyebar dan pengulangan sampel sekecil mungkin.	Dikaji kembali. Diteruskan ke Direktorat Metodologi, namun utk diketahui pada tahun 2003 kerangka sampel Sak. Semesteran tidak menggunakan Susenas.ST.
3.	Beberapa pertanyaan pada Susenas terlalu banyak dan kurang aplikatif untuk rumah tangga elit dan sibuk, sehingga sulit memperoleh data konsumsi yang sebenarnya. Kecendrungan yang terjadi adalah rumah tangga terpilih dialihkan ke rumah tangga yang lebih sederhana sehingga gambaran pengeluaran selalu bias, distribusi pengeluaran tidak akurat.	Untuk Susenas modul konsumsi dan lainnya agar diusahakan lebih sederhana perlu dibuatkan lembar pembantu untuk mencatat pengeluaran harian.	Dikaji kembali
4.	Pemasukan survey upah masih rendah, karena responden agak direpotkan dengan sistem triwulanan	Adanya survei terintegrasi dengan waktu yang sama, seperti dengan industri triwulanan dan survei Hotel	Setuju untuk dipertimbangkan
5.	Pertanyaan-pertanyaan pada daftar Podes tidak tersedia di desa atau instansi terkait. Jikapun ada tidak tersedia merurut desa seperti data telepon, TV dan listrik.	Perlu ada survei khusus untuk data-data yang belum tersedia di desa	
6.	Program pengolahan Susenas sering berubah meski petugas pengolahan sudah dilatih.	Program agar diupayakan mantap dulu baru petugas dilatih.	Untuk Susenas 2003 hanya berubah 2 kali saja mungkin daerah masih banyak menggunakan yang lama.

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	<p>P4B</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelas PDL dan PML sama sebanyak kecamatan, sedang jumlah PDL jauh lebih banyak dari PML. Untuk Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan jumlah kelas PDL melebihi jumlah kecamatan karena berdasarkan ketentuan 1 kelas = 30 PDL - Ada beberapa kecamatan yang harus digabung dalam kelas PDL padahal biaya untuk menginap tidak tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk beberapa Kabupaten jumlah kelas PDL yang lebih kecil dari jumlah kecamatan akhirnya kelas PDL digabung dengan kelas PML, namun secara administrasi tetap terpisah. Hal ini akan menyulitkan administrasi keuangan karena jumlah peserta kelas PML sangat kecil. - Dalam penentuan jumlah kelas, tidak hanya berdasarkan jumlah kecamatan, tetapi juga proporsional dengan jumlah petugas dengan dasar kepadatan blok sensus. 	
8.	<ul style="list-style-type: none"> - Penerangan tentang P4B belum memasyarakat. - Spanduk yang tersedia sangat terbatas. Jumlah Spanduk yang ada dari pusat hanya 120 buah. 	<ul style="list-style-type: none"> - BPS Propinsi melakukan sosialisasi kepala Dinas/instansi/ badan, tokoh agama, rektor, dikantor Gubernur. Dana untuk sosialisasi oleh BPS Propinsi mencapai sekitar 30 juta rupiah - Melakukan dialog interaktif di Televisi dan Radio. - BPS Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dimasing-masing kabupaten/kota. Dana yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten/Kota rata-rata sekitar 4 juta - Melakukan konferensi pers kepada para wartawan media cetak dan elektronik. - Membuat himbauan di media cetak untuk mendukung kegiatan P4B. - BPS Propinsi menambah buat spanduk 1 buah perkecamatan (324 buah) - BPS Kabupaten/Kota menambah jumlah spanduk dibantu oleh Pemda. Namun jumlah yang ada masih kurang. - Sosialisasi sebaiknya dilaksanakan sebulan sebelum 	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Petugas yang dialokasikan setiap petugas mendata 3 blok sensus dirasakan tidak memadai. - Banyak petugas yang mengundurkan diri akibat beratnya pekerjaan. - Ada petugas yang meninggal digigit anjing dan kecelakaan, tetapi karena asuransi dipusatkan, sampai sekarang belum diselesaikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan dimulai dan dilaksanakan secara intensif. - Masing-masing BPS Kabupaten/Kota telah menambah petugas untuk mengantisipasi keterlambatan penyelesaian dengan melatih tanpa adanya biaya tambahan. - Membentuk tim task force untuk membantu pengawasan di lapangan. - Membentuk tim khusus untuk daerah-daerah yang belum didata dan yang petugasnya mengundurkan diri. - Alokasi beban tugas yang wajar untuk pencacahan 1 bulan adalah 2 blok sensus. - Asuransi untuk petugas P4B tidak dipusatkan tetapi dilaksanakan oleh Propinsi sehingga jika terjadi claim prosesnya lebih cepat. 	
10.	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan untuk menjumpai responden di lingkungan WNI keturunan dan di daerah lingkungan elit. Responden tidak bersedia didata atau tidak menerima petugas dengan baik. - Daerah-daerah kabupaten yang wilayahnya sangat luas dan jarak antar desa berjauhan dan sarana transportasi yang sangat sulit - Pada daerah-daerah tertentu responden hanya dapat ditemui pada sore hari, sedangkan pada saat ini cuaca sore hari hujan. - Penyebaran pemukiman penduduk yang tidak menentu, membuat tambannya petugas dalam menjangkau satu rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat lembar pembantu untuk membantu petugas. - Membuat tim Khusus untuk pendataan. - Mengaktifkan kepala lingkungan dengan menyediakan honor - Petugas diminta untuk mengarsir lingkaran diakte/surat kenal lahir, buku nikah sebagai tanda akte tersebut ada, meskipun nomor tidak dicantumkan. Namun demikian hal ini jika dipublikasikan dan dibandingkan dengan jumlah akte yang dikeluarkan tidak sesuai. - Memberdayakan lurah/kepala desa untuk membuat pengumuman pada warganya yang belum terdaftar agar menghubungi kantor lurah/kepala desa. - Agar data mengenai jumlah penduduk yang mempunyai akte/surat kenal lahir maupun akte/surat kawin tidak dimunculkan. - Membentuk posko P4B di desa/kelurahan dan menyediakan dana untuk petugas posko. 	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>ke rumahtangga lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tem-item pada <PU_KL membuat waktu pendataan menjadi lama, seperti no.KTP, Akte kelahiran dan buku nikah, sehingga tidak terisi meskipun ada. - Adanya kemungkinan penduduk yang ewat cacah maupun tidak sempat tercacah karena waktu yang sudah lewat. 		
11.	<ul style="list-style-type: none"> - Kekurangan dokumen dan dokumen tambahan datang terlambat. - Blanko dokumen agar memperhitungkan cadangan yang lebih besar dan sering jumlahnya kurang. misal : <PU-KL dalam 1 kotak 100 lembar ternyata banyak yang kurang (\pm 80 lembar) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencetak KPU-SD agar petugas dapat terus mendata. - Meminta Stiker dari Propinsi Aceh. - Sebaiknya dokumen dicetak di daerah. 	
13. Sumatera Barat			
1.	Data clean / raw data susenas 2002 sangat terlambat dari BPS, biasanya setiap bulan Oktober tahun bersangkutan, sekarang bulan Pebruari tahun berikutnya.	Agar dipercepat, seperti tahun-tahun sebelumnya.	Mudah-mudahan ketersediaan faktor pengalinya tidak terlambat
2.	Jumlah Penduduk Sumatera Barat pada beberapa Kab/Kota mengalami penurunan yang cukup besar.	Sebaiknya BPS memperhatikan saran / koreksi dari BPS Propinsi. Contoh dari hasil pengolahan Susenas 2002 yang lalu, sekitar bulan September 2002 BPS mengirimkan angka sementara Susenas 2002 dan daerah diminta memeriksa serta melihat kewajaran data tersebut. Setelah daerah memberikan koreksi secara tertulis	Perlu dibahas kembali bersama Direktur Stat. Kependudukan BPS

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan juga disampaikan pada pertemuan Ratek Kabid Sosial beberapa bulan yang lalu (sebelum pelaksanaan Susenas 2003) ternyata hasil koreksi ini tidak diperhatikan, sehingga data yang dinyatakan clean tetap yang semula.	
3.	Sebaiknya dalam pengisian KLUI dan KBL Susenas berikutnya jangan pencacah lagi, seperti yang diinstruksikan pada pelatihan Susenas 2003 yang lalu, karena hasilnya sangat jelek.	Sebaiknya dikembalikan ke Pengawas dan pemeriksa, seperti tahun-tahun sebelumnya.	Dipertimbangkan
4.	Karena Dokumen KOR dan Modul tahun 2002 warnanya sama, sehingga sering terjadi salah kirim baik dari Kab/Kota ke Propinsi, maupun dari propinsi ke pusat		Akan diupayakan memberi tanda agar mudah membedakannya
5.	Pencatatan Registrasi penduduk mengalami hambatan karena perubahan wilayah administrasi terkecil dari desa menjadi nagari di daerah kabupaten Propinsi Sumatera Barat. Disamping itu kelanjutan pelaksanaan register penduduk belum ada kejelasan dari BPS.	BPS Propinsi masih menunggu keputusan BPS Pusat tentang pelaksanaan pencatatan registrasi penduduk untuk tahun selanjutnya.	Pengadaan blangko tidak di Pusat lagi, disediakan oleh masing-masing daerah, format mengikuti daftar terdahulu. Daerah tetap mengirim file kompilasi pengolahan.
6.	Perubahan wilayah administrasi yang sering dilakukan, misal : penggabungan desa/kelurahan dan pembentukan nagari, akan menyulitkan dalam melakukan pencacahan, pengolahan, dan penyajian data.	BPS sebaiknya mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, karena di daerah dituntut untuk menyajikan data sesuai dengan kondisi terakhir (<i>up to date</i>)	
7.	Seperti yang dialami beberapa daerah, dalam pelaksanaan P4B ditemui kondisi : - Beban seorang petugas yang	Telah diatasi dengan kemampuan dan sarana yang ada di masing-masing daerah, namun ada beberapa hal yang sulit diatasi sehingga kemungkinan target waktu untuk menyelesaikan	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>cukup berat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya pertanyaan dalam kuesioner, sehingga menyita waktu dan sulit memperoleh datanya. - Medan/ kondisi lapangan yang sulit dan cuaca tidak mendukung - Dokumen P4B kurang. - Dana pencacahan yang relatif kecil - Sosialisasi yang minim 	<p>pencacahan tidak tercapai, diharapkan untuk kegiatan selanjutnya masalah tersebut dapat diantisipasi sebelumnya.</p>	
14. Riau			
1.	<p>Beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangat memerlukan informasi mengenai kemiskinan. Hanya saja informasi yang dapat diberikan sifatnya makro dari data Susenas Kor. Padahal untuk merancang program bantuan kepada keluarga miskin dibutuhkan informasi yang sifatnya individual. Apakah BPS Propinsi dapat membantu mereka mengeluarkan data tersebut dan bagaimana metodologi serta variabel-variabel yang digunakan.</p>	<p>Perlu adanya advokasi/ arahan/pelatihan mengenai hal tersebut oleh BPS kepada BPS Propinsi/Kabupaten/Kota</p>	<p>Sudah ada 3 propinsi yang dapat dijadikan contoh</p>
2.	<p>Di samping kemiskinan banyak indikator pembangunan yang dibutuhkan oleh Pemda Kabupaten/Kota, seperti Indikator Pembangunan Manusia, sayangnya informasi seperti ini sangat terbatas. Ada keinginan untuk menghitung sendiri, namun SDM yang mempunyai kemampuan tersebut juga sangat terbatas.</p>	<p>Perlu adanya pelatihan teknis SDM yang berkenaan dengan hal tersebut.</p>	<p>Diusahakan</p>

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	<p>Susenas merupakan salah satu data sosial yang paling lengkap. Data ini selalu ditunggu-tunggu namun waktu pelaksanaannya di lapangannya kurang menguntungkan.</p> <p>Beberapa kabupaten/kota pada bulan Januari mengalami musim hujan, sehingga lokasi tidak bisa dicapai karena banjir dan jalannya licin (jalan tanah liat/merah). Sedang untuk daerah kepulauan pada bulan-bulan tersebut sedang mengalami angin Utara di mana gelombang laut cukup besar dan ini menyulitkan petugas Susenas di kepulauan. Minta pertimbangan agar jadwal kegiatan ini dapat dirubah apalagi anggaran untuk kegiatan ini selalu terlambat dalam pembahasan. Biaya sangat dibutuhkan oleh petugas terutama untuk transportasi yang relatif mahal.</p>	<p>Kalau tidak mengganggu waktu penyajian data, maka perlu dipertimbangkan untuk merubah jadwal kegiatan, sedang untuk mengatasi anggaran perlu tersedia dana bergilir, hanya saja dana yang harus tersedia relatif besar.</p>	<p>Akan dikaji kembali, mulai Susenas 2005</p>
4.	<p>Dalam anggaran tahun 2003, rate pencacahan di lapangan mengalami kenaikan, hanya saja karena tingkat kesulitan medan yang tinggi perlu dipertimbangkan dalam penyediaan biaya transportasi. Kadang-kadang sampel terpilih terlewat di pulau yang tidak tersedia transportasi regular dan jumlah sampelnya pun hanya satu. Biaya daerah sulit juga sangat terbatas.</p>	<p>Dilaporkan ke BPS agar diganti sampel tersebut.</p>	<p>Kalau memang dengan anggaran daerah sulit masih tidak cukup, bisa diminta penggantian</p>
5.	<p>Pengetahuan Kasi Statistik Sosial di BPS Kabupaten/Kota belum mampu mengimbangi kebutuhan informasi di daerah. Di samping itu</p>	<p>Kasi Statistik Sosial perlu dibina melalui pelatihan teknis kependudukan yang diberikan secara bergilir dan terjadwal. Di samping itu segera diisi jabatan kasi sosial yang masih kosong</p>	<p>Dilaksanakan berangsur-angsur sesuai ketersediaan dana.</p> <p>Akan dikaji pembinaan teknis bidang/seksi sosial secara berkala.</p>

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	adanya pemekaran beberapa kabupaten/kota di Riau menyebabkan banyaknya jabatan kasi sosial yang kosong, sedang SDM yang ada sangat terbatas.	dengan tamatan STIS yang telah memenuhi syarat.	
15. Jambi			
	P4B		
1.	Sebagaimana diketahui bahwa Dokumen KPU-SD dibuat 2 (dua) rangkap. Rangkap pertama diberikan/ditinggal pada responden, dan rangkap kedua diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan. Kalau menurut buku pedoman (P4B-PDL) hal. 78, penyerahan buncel KPU-SD tersebut oleh PML. Mekanisme ini sangat men-bahayakan kondisi BPS, karena PML itu sebagian besar adalah mitra, padahal produk daripada KPU-SD sangat vital dalam rangkaian P4B.	Supaya lebih seragam, dokumen KPU-SD sebaiknya dikumpulkan secara bertahap dari PDL ke PML, kemudian PML menyerahkan kepada PKTK/KTK, dan KTK menyerahkannya kepada BPS Kabupaten/Kota. BPS Kabupaten/Kota yang akan menyerahkan kepada KPU Kab/Kota dan harus disertai dengan berita acara serah terima (dengan format terlampir). Dan disimpan rapi dalam amplop dan map tali.	
2.	Di beberapa daerah : Muaro Jambi, Kec. Sakaman terjadi banjir. Kota Jambi, Kec. Telanipura, Kel. Legok, BS 13-19 (7 BS) sampai dengan tanggal 15 April 2003 belum dicacah sama sekali karena banjir. Mohon untuk daerah tersebut diberi tambahan waktu pencacahn sampai surut Kumpeh Ulu (17) desa, Maro Sebo (2 desa) masih terendam banjir. Sakaman harus ada perahu.	Untuk daerah tersebut kemungkinan agak terlambat selesai pencacahannya. Karena harus mencacah dengan menggunakan perahu.	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	<p>Di Kab. Batang Hari, Kec Muara Bulian, Kel. Muara Bulian terjadi pemekaran kelurahan, menjadi 3 kelurahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muara Bulian 2. Pasar Baru 3. Rengas Condong <p>Karena terjadi pemekaran tersebut, maka kelurahan tersebut penduduknya belum mempunyai KTP baru sesuai dengan lokasi kelurahan (karena perubahan nama kelurahan). Konsekuensinya, di KPU-KL tidak mempunyai KTP. Karena walaupun KTP-nya masih berlaku, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan alamat (perubahan nama administrasi desanya). Apa ini tidak mempengaruhi hasil P4B dimana hampir 3 kelurahan tersebut tidak mempunyai KTP, atau ada pengecualian.</p>	<p>Karena terjadi pemekaran tersebut, maka kelurahan tersebut penduduknya belum mempunyai KTP baru sesuai dengan lokasi kelurahan (karena perubahan nama kelurahan). Konsekuensinya, di KPU-KL tidak mempunyai KTP. Karena walaupun KTP-nya masih berlaku, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan alamat (perubahan nama administrasi desanya).</p> <p>Apa ini tidak mempengaruhi hasil P4B, dimana hampir 3 kelurahan tersebut tidak mempunyai KTP, atau ada pengecualian.</p> <p>Untuk alamat mengikuti Buku Pedoman P4B-PDL hal. 28, seperti: Jalan Statistik II Nomor 41A Ditulis : JL STATISTIK 2 NO. 41A</p>	
4.	<p>Dari beberapa responden (Daftar KPU-KL) ditemukan bahwa nomor surat nikah, akte kelahiran menggunakan angka Romawi (I, II, III, IV, V, dst.). Contoh :</p> <p>Buku Nikah : 674/26/VI/1995 73/33/VI/1989 400/05/IX/00</p> <p>Akte Kelahiran : 22/D/II/S-1920</p> <p>Apakah ini bisa dibaca scanner ?</p> <p>Dalam pedoman P4B-PDL hal. 28 Jalan Statistik II Nomor 41A Ditulis : JL STATISTIK 2 NO 41A Apakah ini bisa dibaca scanner ?</p>	<p>Sementara untuk buku nikah, akte kelahiran tidak dirubah (sesuai aslinya).</p>	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Nama ibu/bapak kandung tidak mau diisi (karena kultur). Apakah dibolehkan ?	Tetap harus diisi, bagaimanapun caranya	
16. Sumatera Selatan			
1.	Data yang harus dikumpulkan dalam rangka penerbitan publikasi di Seksi Ketahanan Sosial perlu ada sosialisai yang lebih jelas karena sampai dengan saat ini belum ada kuesioner baku yang memberi petunjuk guna pengumpulan data pada instansi terkait.	Diharapkan BPS sudah membuat kuesioner baku sebagai acuan guna pelaksanaan kegiatan tersebut di daerah.	
2.	Pengiriman data final hasil pengolahan susenas 2002 dari BPS Pusat sangat terlambat, sehingga penerbitan publikasi di daerah menjadi terhambat.	Dengan otonomi daerah BPS Propinsi dan Kabupaten/Kota dituntut untuk dapat menyajikan data dengan cepat. Oleh karena itu diharapkan pengiriman data hasil pengolahan survei Susenas dan Sakernas lebih awal. Walaupun demikian, BPS Propinsi tetap membuat publikasi dengan angka sementara.	
3.	Blok sensus terpilih sampel sering berada di daerah sulit, sehingga untuk mengunjungi wilayah tersebut, selain memakan waktu juga harus mengeluarkan biaya besar. Dan akhirnya ini banyak daerah yang rawan kriminal, sering terjadi pencodongan dan perampokan. Apabila daerah tersebut terpilih sampel, maka petugas takut melaksanakannya.	Hendaknya wilayah blok sensus yang sulit dan rawan, yang datanya sudah disampaikan oleh BPS Sumsel tidak lagi terpilih dalam survei-survei selanjutnya.	
4.	Dokumen-dokumen survei terlambat dikirimkan ke daerah.	Sebaiknya dapat diantisipasi dengan mengirimkan lebih awal.	
5.	Bag kabupaten/Kota yang baru seperti Pagaram, Lubuk	Sebaiknya BPS dapat menindaklanjuti.	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	Linggau dan Prabumulih frame sampel kegiatan survei pada tahun yang akan datang harus sudah dipisahkan dari Kabupaten/ Kota induknya mengingat data publikasinya sangat dibutuhkan oleh pemda masing-masing.		
6.	P4B Berkurangnya jumlah petugas P4B dari target semula membuat beban kerja petugas menjadi berat dan hasil pencacahan relatif terlambat.	Jumlah petugas yang dilatih, ditambah dan memfungsikan PML untuk membantu PDL. Selain itu petugas lapangan yang sudah selesai dari daerah lainnya dapat ikut membantu. Oleh karena itu untuk kegiatan lain yang memerlukan banyak petugas, sebaiknya lebih diperhatikan.	
7.	Pengiriman dokumen untuk pelatihan dan pelaksanaan lapangan sangat terlambat dari yang dijadwalkan.	Sudah dilakukan pemberitahuan ke KPU Pusat via faks atau telpon, akan tetapi tidak ditanggapi dengan cepat.	
8.	Jumlah dokumen untuk pelatihan dan pelaksanaan masih banyak yang kurang.	Sudah dilakukan pemberitahuan ke KPU Pusat via faks atau telpon, akan tetapi tidak ditanggapi dengan cepat.	
9.	Pertanyaan dalam kuesioner KPU-KL yang menyangkut nomor KTP, buku nikah dan akte kelahiran dirasakan sangat memperlambat waktu wawancara, serta merepotkan responden.	Sudah dihimbau melalui kegiatan sosialisasi atau penerangan lainnya di daerah-daerah agar masyarakat dapat ikut membantu dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan petugas, termasuk kewajiban petugas untuk menanyakannya.	
10.	Sosialisasi dari KPU kurang sehingga banyak aparat kecamatan dan desa belum mengetahui kegiatan P4B.	Seyogyanya roadshow ke daerah-daerah perlu dilakukan oleh tim KPU Propinsi/ Kabupaten/ Kota.	
11.	Kurangnya daya dukung kendaraan roda dua bagi daerah-daerah yang sulit dan jauh seperti daerah-daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Muara Enim.	Mohon dapat diperhatikan keperluan ini untuk kegiatan survei dan sensus.	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
17. Bengkulu			
1.	Pelaksanaan Pencacahan SSN yang dilaksanakan sebelum pembahasan anggaran dengan DJA mengakibatkan situasi yang kurang kondusif di lapangan.	Sebaiknya pelaksanaan SSN dilaksanakan menjelang saat-saat pembahasan dengan DJA agar pelaksanaan lancar dan selesai tepat waktu.	Akan dipertimbangkan, kecuali Susenas 2004
2.	Dokumen-dokumen survey yang dikirim dari BPS Pusat tidak ada surat pengantarnya sehingga terjadi kekurangan dalam jumlah yang cukup besar. (Susenas 2002)	Pengiriman dokumen-dokumen survey dari BPS Pusat ke BPS Propinsi sebaiknya dilampiri surat keterangan di boks no 1 agar memudahkan pengecekan kelengkapan dan jumlahnya.	Selain ada surat peng-antarnya, bahkan dikirim sebelum dokumen dikirim. Surat pengantar dari ekspidisi juga ada bersamaan dengan pengiriman dokumen. Mestinya daerah menginformasikan segera ke pusat
3.	Parameter-parameter Demografi, Proyeksi Penduduk dan IPM Kab/Kota yang harus dihitung oleh BPS Pusat sangat terlambat padahal sangat diperlukan oleh Pemda Kab/Kota dan seringkali ditanyakan instansi terkait baik tingkat Propinsi maupun Kab/Kota.	1.Kalau memang harus dikerjakan oleh BPS Pusat sebaiknya lag waktunya diperhatikan. 2.Kalau daerah diijinkan membuat, mohon diberikan asumsi-asumsi yang digunakan agar sinkron dengan hasil penghitungan dari pusat.	Diusahakan. Proyeksi penduduk memakan waktu lama karena penentuan asumsi sangat terkait dengan instansi lain. Penghitungan parameter demografi tk. kab/kota hanya ada untuk keperluan IPM
4.	Ada kesulitan memperoleh data statistik PN karena format yang dibutuhkan BPS berbeda dengan format pencatatan administrasi mereka. Selain itu petugas PN kurang peduli sehingga pelayanan mereka tidak maksimal. Hal ini mungkin karena adanya anggapan tidak ada ikatan antara instansi mereka dengan BPS Propinsi.	Mohon memorandum kerjasama antara BPS Pusat dengan Memperkumdam & HAM bisa disampaikan sampai ke daerah sehingga petugas kami mempunyai dasar hukum untuk meminta data yang diperlukan.	Data LP dan PN masih diperlukan oleh berbagai pihak, namun oleh karena data dimaksud sebagian besar sudah dapat diperoleh dari instansi terkait baik di level Kab/Kota, Prov. maupun Pusat, maka dipandang tidak perlu lagi mengumpulkan data melalui instrumen LP-1/2 dan PN-1/2 sebagaimana telah diputuskan beberapa waktu yl.
19. Kep. Bangka Belitung			
1	Jadwal Waktu antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya tumpang tindih, seperti P4B SDKI, Sakernas	Mengoptimalkan pendayagunaan staf bidang lain di propinsi dan staf seksi di Kab/Kota, sehingga semua pekerjaan tetap berjalan dengan lancar	Memang harus memanfaatkan SDM di bidang lain

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
2	dan sebagainya yang tidak dapat dihindarkan Indikator ketenagakerjaan hasil SAKERNAS Triwulanan tidak tersedia di propinsi, karena diolah di BPS Pusat sedangkan permintaan data ketenagakerjaan semakin meningkat	Meminta ke subjek matter di BPS agar data SAKERNAS triwulanan hasil pengolahan dikirim ke propinsi	Sakernas Triwulanan hanya di design untuk penyajian indikator tingkat nasional, namun jika dibutuhkan kita akan kirimkan ke daerah
31 DKI Jakarta			
1.	Survey struktur upah cukup rumit, banyak perusahaan tidak bersedia mengisi data nya. Beban satu perusahaan melayani BPS cukup berat mulai dari Survei Industri, Peta Industri, Survei Upah dan Struktur Upah	Dipertimbangkan untuk penyederhanaan simplikasi format dokumen dengan memanfaatkan survey-survey lainnya	Tetap diusahakan agar pemasukan dokumen survei upah mencapai target
2.	Padai saat pelaksanaan P4B masih ditemukan peta Blok Sensus hasil updating ST 03 yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan	Membuat peta Blok Sensus yang baru sesuai dengan keadaan dilapangan	
3.	Pemasukan dokumen hasil survei di Seksi Statistik Produksi sedikit terhambat karena semua petugas sibuk mengurus P4B, selama bulan April dan Mei 2003		
4.	Petugas mendapat kesulitan melakukan pendataan di rumah tangga elit dan Apartemen. Hal ini disebabkan karena ada penduduk yang enggan berpartisipasi, penduduk hanya ada dirumah ketika malam hari, ada juga kecurigaan penduduk terhadap petugas sehingga harus didampingi oleh keamanan setempat.	Diharapkan Kelurahan lebih berperan aktif dengan membuat pemberitahuan kepada warga melalui RW dan RT tentang pelaksanaan P4B.	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Petugas mengundurkan diri karena tidak mau bertugas di daerah elit. Berdasarkan pengalaman mereka waktu SP 2000, mencacah di daerah elit lebih sulit daripada di pemukiman biasa	Minta bantuan kepada Korwil di BPS Propinsi DKI agar dikirim petugas Task Force, ditambah dengan mengerahkan petugas yang mau membantu mencacah di daerah elit dipimpin oleh PKTK, dimana mereka mencacah dengan menggunakan kuesioner pembantu	
6.	Peta BS masih banyak yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan. Hal ini termasuk salah satu factor yang memperlambat petugas dalam pelaksanaan pencacahan.	Petugas mengambil inisiatif dengan mendata menurut RT dan RW tanpa berpedoman pada peta BS	
7.	Banyak petugas yang kurang memahami konsep dan tatacara pengisian P4B	Di adakan penjelasan ulang pada saat pertemuan yang dilakukan secara rutin setiap minggu	
8.	Pemasukan dokumen hasil survei di Seksi Statistik Distribusi sedikit terhambat karena semua petugas sibuk mengurus P4B, selama bulan April dan Mei 2003	Kontrol Pemasukan/pengembalian Dokumen P4B dibuat secara manual pada masing-masing Koorcam/KTK.	
9.	Program yang dikirim dari IPDS Prop/BIP belum berjalan sebab Data WK dari KTK belum tersedia serta petugas yang menanganinya tidak ada. Staf sudah terserap sebagai petugas P4B		
10.	Ada kawasan/lokasi di Kel. Kedoya Utara yang tidak diakui Aparat setempat dan belum termasuk ke dalam salah satu Blok Sensus (BS) muatan sekitar 900 KK	Pendataan tetap dilaksanakan dengan identitas Blok Sensus (BS) untuk sementara diberi kode 00 demikian juga RT/RW	
11.	Kekurangan kuesioner KPLI-SD sebanyak 1.380 buku, sudah diusulkan sejak 10 April 2003 namun jawaban	BPS Propinsi diharapkan bantuannya untuk memintakan kekurangan tersebut ke KPU Pusat	

No.	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	KPU hanya dikirim 1.380 set, akibatnya kegiatan PDL di lapangan terhambat		
12.	Samoai tanggal 27 April 2003 telah 56 PDL mengundurkan diri	Dilatih lagi petugas baru sebanyak 45 orang sisanya ditangani PML	
32. Jawa Barat			
1.	Kekurangan dokumen pencatatan P4B (seperti daftar KPU-KL, KPU-SD, dan Stiker) Penyebab: a. Satu dus kecil daftar KPU-KL yang seharusnya berisi 100 lembar, sekitar 30 hanya berisi 70-80 daftar KPU-KL. b. Stiker: satu bungkus stiker yang seharusnya berisi 200 lembar (satu lembar @ 12 buah), ternyata sekitar 50% hanya berisi 180-190 lembar. Stiker dipotong tidak pada sisi atas, tetapi justru dipotong pada bagian tengah stiker sehingga tidak dapat digunakan.	BPS Kabupaten/Kota memberitahukan kekurangan dokumen ke Sekretariat KPU Pusat dengan tembusan ke BPS Pusat dan BPS Propinsi. PDL tetap melakukan pendataan. Informasi yang dibutuhkan dalam KPU-KL dicatat dalam buku/lembaran kertas. Tetap mendata dengan KPU-KL meskipun responden tidak langsung menerima KPU-SD. KPU-SD disusulkan kemudian bila KPU-SD sudah tersedia.	
2.	Penduduk di kompleks perumahan daerah elit perkotaan kurang kooperatif, sulit ditemui dan bila dapat ditemui PDL memerlukan waktu yang lebih lama karena responden menanyakan banyak hal.	Sosialisasi ditingkatkan dan dioptimalkan dengan menggunakan semua media massa yang ada.	
3.	Kasus penduduk yang tidak mau didata P4B. Di Kabupaten Garut sekitar 200 rmt atau sekitar 1000 jiwa dan di Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka sekitar 101 rmt atau sekitar 423 jiwa anggota Darul Islam	Penduduk anggota Darul Islam Fillah cukup dicatat saja nama kepala rumah tangga dan banyaknya anggota rumah tangga.	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Fillah tidak mau didaftar walaupun pihak pemda dan instansi terkait ikut terjun ke lapangan mereka tetap menolak untuk didata.</p>		
4.	<p>Sosialisasi P4B sangat minim. Gaung P4B tidak bergema sehingga sebagian masyarakat masih tidak tahu/tidak paham kegiatan P4B.</p>	<p>Meskipun sosialisasi ini merupakan tugas dari KPU, namun kami di daerah tetap melakukan kegiatan sosialisasi baik melalui media cetak maupun media elektronik dengan harapan kegiatan ini dapat selesai tepat pada waktunya.</p>	
5.	<p>Pertanyaan pada kuesioner KPU-KL terlalu rumit dibanding dengan daftar pertanyaan yang digunakan pada saat pendataan Sensus Penduduk 2000. Responden dibuat repot untuk menyiapkan akte kelahiran, surat nikah dll.</p>	<p>Sebelum pelaksanaan lapangan P4B di beberapa kabupaten/kota dilaksanakan anjuran oleh pemerintah setempat kepada warganya untuk menyiapkan surat-surat yang akan dicatat pada kuesioner P4B.</p>	
6.	<p>Pengurangan jumlah petugas P4B berakibat pada meningkatnya beban kerja petugas P4B. Rata-rata PDL bertugas di tiga blok sensus, memerlukan waktu yang lebih lama.</p>	<p>Dipersilakan menambah petugas dengan biaya dari Pemda setempat. BPS Kota Sukabumi dan Kota Depok bekerjasama dengan KPU setempat menambah jumlah petugas dengan biaya dari KPU/Pemda.</p>	
7.	<p>Di Kecamatan Teluk Jampe (Desa Wanajaya, Margakaya, Margamulya, Wadas, Sukaluyu, Puseurjaya dan Simabaya) terdapat kawasan kehutanan/hutan negara yang dihuni dan dikuasai serta digarap oleh masyarakat secara liar. Dari hasil pendataan, baru terdata sebanyak 528 jiwa yang benar-benar berdomisili di kawasan tersebut, tapi pihak kabupaten sulit untuk menentukan batas desa yang jelas. Para Kepala Desa pun</p>	<p>Hasil P4B di wilayah tersebut, untuk identitas alamat pada KPU-KL hanya ditulis sampai dengan tingkat kecamatan.</p>	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	mengakui keberadaan mereka, karena mereka selalu menuntut hak kepemilikan atas lahan tsb.		
8.	Pembentukan dan penelaan kecamatan (Perda Nomor 35 Tahun 2002, tanggal 1 Januari 2002); Di Kabupaten Cirebon jumlah kecamatan bertambah dari 29 kecamatan menjadi 31 kecamatan, jumlah desa/kelurahan tetap (412 desa dan 12 kelurahan) namun jumlah desa/kelurahan di masing-masing kecamatan mengalami perubahan.	Dilakukan pencatatan untuk keperluan pengolahan, wilayah-wilayah mana saja yang mengalami perubahan/pemekaran wilayah administrasi.	
9.	Di perbatasan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon terdapat 1 (satu) blok sensus yang dihuni oleh penduduk dengan status sebagai warga Kota Cirebon tetapi berdomisili di wilayah Kabupaten Cirebon (Kel. Sukapura). Masyarakat tidak mau didata oleh PDL dari Kab. Cirebon, karena meskipun mereka tinggal di wilayah Kab. Cirebon, namun segala urusan administrasi kependudukan selama bertahun-tahun dilakukan ke Kota Cirebon.	Merekrut dan melatih petugas yang berasal dari wilayah tersebut. Meneliti batas wilayah dari sketsa peta wilayah, baik yang dimiliki oleh BPS Kab. Cirebon maupun BPS Kota Cirebon, dan hasilnya sama, yakni keduanya menunjukkan batas wilayah tersebut secara geografis merupakan wilayah administrasi Kab. Cirebon. Mencari informasi kejelasan dimana batas jelas yang sesungguhnya yang menjadi pemisah antara wilayah Kab. Cirebon dengan Kota Cirebon di wilayah tersebut. Mencari titik temu antara kepentingan metodologis P4B dengan aspirasi masyarakat yang berkembang. Karena itu, dengan mempertimbangkan kelancaran pelaksanaan P4B dan sekaligus jangan sampai terjadi penduduk tidak didata (lewat data) maka titik temu yang dimaksud adalah bahwa pendataan tetap dilaksanakan oleh LDO Kab. Cirebon namun hasilnya (pada tingkat pengolahan) akan dialihkan ke wilayah Kota Cirebon, yakni dengan cara mengganti identitas wilayah kerja dari Kab. Cirebon menjadi Kota Cirebon.	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Ada beberapa responden survei upah/struktur upah yang sulit bahkan cenderung tidak memberikan laporannya, sedangkan perusahaan yang sejenis dengan responden tersebut tidak ada, sehingga tidak ada pengantinya. Misalnya perusahaan industri persenjataan PT. Pindad, perusahaan pulpik Kujang dsb.	Kami tetap meminta ke ke BPS kabupaten/kota untuk tetap berusaha melaksanakan tugas ini dan diusahakan untuk lebih meningkatkan pencapaian target dan ketepatan waktu.	
11.	Banyak kegiatan survei/sensus yang dilaksanakan BPS bersamaan waktunya. Ada kegiatan pelatihan suatu survei/sensus yang waktunya bersamaan dengan pelaksanaan lapangan kegiatan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan terlambatnya pemasukan dokumen dari petugas ke BPS Kabupaten/Kota dan seterusnya.	Koordinasi antar Subject Matter di BPS perlu ditingkatkan supaya dapat mengurangi adanya dua kegiatan yang berbeda dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.	Sudah diupayakan dengan mengintegrasikan beberapa kegiatan, tetapi tidak seluruhnya dapat dilakukan.
12.	Rule validasi program entry Susenas kurang lengkap, sistem keamanannya sangat terbuka, sehingga operator dapat meng-up date rule validasi.	Uji coba program perlu ditingkatkan dengan variasi isian yang beragam, sehingga permasalahan entry dapat diminimalkan	Akan dipelajari penyempurnaannya.
13.	Pembayaran biaya lapangan Susenas terlambat akibat terlambatnya pemrosesan DIP/PO P2S	LK DIP P2S pada awal tahun anggaran berjalan dapat diterima oleh BPS Propinsi sehingga segera dapat dibahas oleh Ditjen Anggaran.	Keterlambatan bukan dari BPS, tetapi dari Departemen Keuangan.
33. Jawa Tengah			
1.	Pencacahan Susenas Modul agar diarahkan seperti SBH agar kesinambungan data penyalatan dan pengeluaran	Daerah menambah sampel sendiri sesuai dengan kebutuhan	Penambahan sampel oleh daerah sangat didukung

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	rumah tangga lebih konsisten. Untuk itu agar sampel rumah tangga modul untuk kota SBH agar diperbanyak. Berdasarkan analisis hasil kor Susenas sangat bias dibandingkan dengan hasil SBH.		
2.	Blanko daftar LP1 Lp2 PN1 dan PN2 yang dikirim lewat E Mail mengakibatkan pemrosesan karena daerah harus mencetak sendiri	Laporan LP dan PN sudah tidak dilaporkan lagi ke BPS	Data LP dan PN masih diperlukan oleh berbagai pihak, namun oleh karena data dimaksud sebagian besar sudah dapat diperoleh dari instansi terkait baik di level Kab/Kota, Prov. maupun Pusat, maka dipandang tidak perlu lagi mengumpulkan data melalui instrumen LP-1/2 dan PN-1/2 sebagaimana telah diputuskan beberapa waktu yg.
3.	Ada perbedaan antara pedoman Sakernas Triwulan Tahun 2002 dengan daftar sampel Triwulan I Tahun 2003 yang mestinya merupakan kelanjutan dari Sakernas Triwulan I dan IV Tahun 2002, sehingga blok sensus yang tinggal melakukan pencacahan tanpa listing dan telah dilakukan pencacahan menjadi tidak berguna	Ada perubahan sampling dari Tahun 2002 dengan Tahun 2003 sehingga Triwulan I 2003 yang tadinya semua blok pencacahan ulang diganti separuh blok sampel baru	Untuk Sakernas Triwulan I 2003 separuh dari sampelnya memang sampel baru
4.	Realisasi pemasukan dokumen Sakernas Triwulan I Tahun 2003 jauh dari target sampai dengan tanggal 30 April 2003 baru 94,01 % disebabkan E Mail beberapa daerah mengalami kerusakan sehingga DSBS terlambat diterima di daerah, petugas mempunyai beban kegiatan yang berat dengan adanya P4B	Bagi daerah yang mengalami kerusakan E Mail agar mengkopi ke Kab. terdekat yang E Mailnya tidak rusak. Disamping itu menginstruksikan ke daerah yang sudah menerima E Mail agar memberikan informasi ke Kabupaten lainnya minimal se Karesidenan Memberikan teguran ke daerah agar dapat membagi waktu dengan baik sehingga kegiatan rutin tidak diabaikan	Pengawasan lapangan harus lebih intensif km Data Sak.Triwulan harus sdh disajikan pada triwulan berikutnya shg keterlambatan dokumen akan mempengaruhi keakuratan dalam estimasi
5.	- Realisasi Survei Upah rata-rata	Mengingat ke daerah agar realisasi kegiatan rutin bisa dipenuhi. Untuk	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Survei Upah rata-rata hanya mencapai 80% setiap Triwulan. Pencapaian angka tersebut sudah melewati batas akhir setiap periode pengiriman.</p> <p>- Sampel perusahaan Kota Semarang merupakan target terbesar namun termasuknya sangat rendah sehingga menyebabkan realisasi jauh dari target.</p>	<p>perusahaan yang tiga kali tidak bisa memberikan informasi/menolak walaupun sudah diadakan pendekatan agar dicarikan pengganti sesuai dengan ketentuan.</p>	
6.	<p>Target pencacahan sampel rumah tangga Susenas panel bisa terpenuhi 100%, sedangkan pencacahan modul Susenas MSBP 99,57% (sampel tanggal 1 Mei 2003), disebabkan banyaknya kegiatan/pekerjaan yang lain (P4B, Sakernas, dsb.).</p>		Berarti sudah bagus (relatif lengkap)
7.	<p>Masih terdapat beberapa isian yang tidak konsisten pada Dokumen Susenas sehingga masih perlu konfirmasi dari daerah yang bersangkutan.</p>		BPS Kab/Kota diminta agar lebih cermat melakukan pemeriksaan
8.	<p>Honor petugas lapangan Susenas 2003 sangat terlambat diterima (pekerjaan telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember 2002, namun sampai awal Mei 2003 honor belum keluar).</p>		Mudah-mudahan cairnya anggaran di bulan-bulan mendatang bisa lebih cepat
9.	<p>Program pengolahan Susenas 2003 tidak siap dioperasikan (sering masih ada perubahan program), hal ini</p>		

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	merupakan keterlambatan pengolahan.		
35. Jawa Timur			
1.	Pelaksanaan pencacahan Sakernas di sebagian besar kab/kota di Jawa Timur melampaui jadwal yang ditetapkan BPS. Hal ini disebabkan ada-nya kesibukan Mantis/ Staf di BPS kab/kota dalam menangani P4B	Diupayakan untuk diselingi antara kegiatan P4B dengan kegiatan rutin	
2.	Registrasi Penduduk Pengadaan blanko RPT/ RPA sejak tahun 2000 belum dikirim oleh BPS Pusat. Sehingga pengumpulan data menjadi tersendat.	Beberapa BPS Kab/Kota memperbanyak (foto copy) sendiri dengan menggunakan blanko lama yang diganti tahunnya	
3.	Data hasil proyeksi penduduk 2001 -- 2010 menurut kelompok umur hingga saat ini belum dikirim dari BPS Pusat. Data tersebut sangat diperlukan untuk penyusunan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, mis : penyusunan perencanaan ketenagakerjaan daerah.		
4.	Sampai saat ini tabulasi Podas ST03, untuk bahan publikasi belum ada	Menunggu program tabulasi dari BPS Pusat, agar terjadi keseragaman tabulasi.	
5a.	Susenas 2003 dilaksanakan dalam dua tahun anggaran listing Desember 02, pencacahan mulai Januari 03 sementara anggaran baru bisa cair pada akhir April 03 (lebih dari 4 bulan). Petugas mengeluh atas keterlambatan pembayaran, apalagi sebagian besar petugas	Diberikan penjelasan tentang prosedur anggaran sekarang yang prosesnya bisa memakan waktu lebih dari dua bulan. Untuk tahun anggaran berikutnya diharapkan LK dari BPS Pusat bisa diterima lebih awal, agar proses pembahasan anggaran di daerah bisa dipercepat.	Akan disampaikan ke Biro Bina Program

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	Susenas juga menjadi petugas P4B. (bisa menghambat P4B)		
5b.	a. Faktor pengali untuk Susenas 2002, beberapa daerah perlu diperbaiki terutama untuk Kota Kediri karena dari pertumbuhan negatif menjadi positif diatas 5 persen	Sementara menggunakan angka yang sudah ada. Diharapkan adanya perbaikan faktor pengali	
5c.	Sampai saat ini tabulasi final Susenas 2002 baik Kor maupun Modul Konsumsi belum diterima. Adapun tabel Kor yang dikirim terakhir ternyata sama dengan tabel sebelumnya (tidak lengkap: sebagian besar tabel pendidikan dan ketenagakerjaan belum dipecah menurut jenis kelamin, tabel pengeluaran tidak ada)	Sementara menggunakan tabel yang sudah ada. Untuk keperluan publikasi mohon segera dikirimkan tabulasi final modul konsumsi dan kor (tabel lengkap seperti tahun sebelumnya)	Akan diberikan pada waktu Ratek; data dari Disemina-si Stat., table dasar dari Dirat Stat. Kesra
5d.	Pengawasan dalam pelatihan seringkali tidak direpson dalam pembuatan program pengolahan	Terpaksa mengikuti alur/validasi sesuai dengan program yang ada. Untuk pelaksanaan berikutnya mohon adanya konfirmasi antara intama/master intama dengan pembuat program pengolahan	Dikaji kembali
5e.	Program pengolahan Susenas masih saja banyak kesalahan dan perbaikannya seringkali terlambat dikirim ke BPS Propinsi, sehingga banyak Kabupaten/ kota yang sudah selesai entry dengan program lama	Terpaksa dilakukan update terhadap data yang sudah dientry (memaksimal mungkin) Untuk pelaksanaan berikutnya mohon dilakukan ujicoba program secara lebih mendalam, dan disertai pelatihan pengolaha	Dikaji kembali
36. Banten			
1.	Dalam era otonomi, tuntutan daerah dalam penyediaan informasi statistik diperlukan informasi yang lebih rinci, lengkap dan cepat	BPS Pusat dimohon mengirim hasilnya (dalam bentuk hard copy atau soft copy) untuk keperluan daerah.	Biasanya kedua-nya diberikan, Mestinya Kabid Stat.Sosial memintanya kalau memang belum diserahkan

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	untuk kegiatan statistik, seperti Sakernas dan Susenas 2002. Data hasil SP2000, baik untuk record SP2000-L2 dan SP2000-L1 sampai dengan saat ini belum dipunyai.	Mohon untuk diinformasikan dalam bentuk soft copy.	
3.	Keterbatasan SDM dalam menangani analisis dan penghitungan beberapa indikator pokok sosial dan kependudukan (seperti IPM, IKM, IPJ dll) serta pembuatan program pengolahan.	Kaderisasi analisis dalam bidang sosial dan kependudukan dengan diadakan secara kontinu dan program pengolahan tidak sebatas program entry data.	Diupayakan. Akan dikaji pembinaan teknis bidang/seksi sosial secara berkala.
4.	Survei upah yang dilaksanakan selama ini sampelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat menggambarkan per upah secara sektoral, utamanya untuk mengetahui upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota	Sampel survei upah ditambah oleh BPS Pusat.	Saat ini BPS Pusat sedang mengkaji ulang alokasi sample
51. Bali			
1.	BPS daerah secara umum sulit mendapatkan data clean dari BPS baik data dalam bentuk tabel yang sudah jadi maupun raw data-nya. Sementara faktor pengali masih ditetapkan oleh BPS	Menunggu kiriman BPS walaupun harus memintanya berulang kali	Seharusnya daerah punya perhatian dengan data yang telah diberikan sehingga tidak perlu memintanya kembali di belakang hari. Raw data dan table-tabel SUSENAS misalnya segera dikirimkan setelah tersedia
2.	Beberapa jenis data yang dikeluarkan BPS belum/terlambat diterima BPS daerah seperti penduduk miskin dll. Ketika suatu instansi mengkonfirmasi/membutuhkan data tersebut BPS daerah tidak siap	Menunggu kiriman BPS walaupun harus memintanya berulang kali	Sudah ada mekanisme penyampaiannya ke daerah; daerah agar membuat secara jelas aturan pendistribusiannya di daerah
3.	Tabel-tabel pokok SUSENAS 2001 final Propinsi Bali, belum diterima di BPS Propinsi Bali sampai sekarang	Menunggu tabel final dari BPS, BPS Propinsi menyajikan data hasil pengolahan sendiri	Seharusnya daerah sudah bias membuatnya sendiri. BPS Pusat tidak melakukan tabulasi ulang dari yang telah dipublikasikan

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Tabel Susenas sering ada kekeliruan (sebagai contoh Susenas 2002 final). Jumlah penduduk 10 tahun ke atas lebih besar dari penduduk usia kerja (Tabel 1 berbeda dengan table 3 dan 4).	Minta klarifikasi BPS. Dicoba perbaiki di daerah tetapi akan ada pengaruhnya ke total nasional.	Informasi tidak jelas/tidak lengkap. Tabel apa yang dimaksud, Kor, Modul atau di Publikasi?
5.	Raw data Susenas 2002 konsumsi dan table finalnya belum diterima sampai sekarang. Anehnya, ada instansi lain mempunyai data yang sudah lengkap, menurut mereka diperoleh di BPS.	Apa data tersebut boleh diminta BPS Propinsi? Kalau tidak boleh apa alasannya dan kenapa instansi daerah lain dapat datanya, mohon BPS Propinsi juga dikirim.	Semua daerah telah diberikan data Susenas. Kalau permintaan draf ini belum ditangani semata-mata karena kesibukan di BPS.
6.	Data hasil entry Susenas 2003 telah dikirim secara keseluruhan ke BPS Pusat, tetapi hanya sebagian yang diterima di BPS	Dikirim ulang, dikuatkan operator BPS tidak profesional.	Barangkali karena faktor jaringan atau gangguan lainnya
7.	Biaya pencacahan Susenas dengan muatan mencapai 300 pertanyaan atau lebih terlalu murah dibandingkan survei lain seperti dari neraca, distribusi dan lainnya. Biaya listing masih relatif rendah.	Mengusulkan kenaikan upah menurut banyaknya jumlah pertanyaan dalam kuesioner. Biaya listing yang ideal sebesar Rp 90.000,- yaitu Rp 30.000,- x 3 hari sama dengan upah pembantu tukang bangunan.	Peningkatan upah selalu diupayakan tetapi hasilnya tergantung ketersediaan dana dari pemerintah.
52. Nusa Tenggara Barat			
HANSOS			
1.	Adanya perubahan format /isi laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (sebelumnya bernama NKLD), menyebabkan buku Pedoman Penyusunannya sudah tidak sesuai lagi.	Buku Pedoman Penyusunan NKLD agar dibuat/direvisi kembali	
2.	Data final hasil PODES ST/C3. termasuk penentuan status Desa/Kota sampai saat ini belum diterima di BPS Propinsi.	<u>Mohon segera dikirimkan</u>	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
STATISTIK KESRA			
3.	Selama ini Sampel SUSENAS tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, akibatnya responden mengalami kejenuhan karena terlalu sering juga kena survei yang lain.	Perlu dipikirkan kembali oleh BPS Pusat agar terjadi perputaran sampel.	Pemilihan sampel dilakukan independen antar tahun, mungkin beberapa diantaranya terpilih kembali.
4.	Apatika telah terjadi penggantian sampel karena daerah rawan/ sering konflik, mengapa untuk survei yang sama di tahun mendatang atau untuk survei lain selalu blok yang diganti tersebut terpilih kembali.	Perlu koordinasi antar bagian di BPS Pusat, sehingga blok yang diganti tersebut tidak terkena kembali.	Diteruskan ke Dirat. Metodologi.
5.	Biaya pencacahan Susenas selalu mengalami keterlambatan.	Mohon untuk tahun mendatang bisa lebih dipercepat karena pencacahan Susenas juga menggunakan mitra.	Mudah-mudahan cairnya DIP tidak tertunda lagi seperti tahun-tahun sebelumnya
6.	Row data Modul Konsumsi Susenas 2002 sampai saat ini belum dikirim ke daerah	Mohon segera dikirim karena banyak konsumen data yang memerlukan.	
STATISTIK DEMOGRAFI			
7.	Kegiatan registrasi penduduk yang pelaksanaannya selama ini sudah dihentikan, akan tetapi konsumen data masih membutuhkan data jumlah penduduk sampai dengan tingkat desa.	Sementara data yang tersedia (terakhir) sampai tingkat desa adalah data SP 2000. Mohon penegasan pelaksanaan registrasi penduduk apakah tetap dilaksanakan.	
5.3. Nusa Tenggara Timur			
1.	Sampel Susenas, cukup banyak yang sulit dijangkau petugas (daerah sulit) sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan (pelaksanaan lapangan). Selama ini ada penggantian sampel namun hanya untuk daerah dengan	Diusulkan agar Sampel di daerah sulit dapat diganti dengan merujuk pada informasi BPS daerah.	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	permasalahan yang dianggap " luar biasa " seperti adanya perang tanding atau putus transportasi.		
2.	Salah satu Sampe Survey Upah Sektor Konstruksi berubah produksi menjadi Sektor Perdagangan, Sesuai dengan penjelasan pada Pedoman Pencacahan, Sampel tersebut tidak perlu diganti, sehingga selama ini perusahaan tersebut tetap dicacah dengan koisioner Sektor Perdagangan. Alokasi dokumen pencacahan dari BPS merujuk pada komposisi Sampel yang lama, Mohon petunjuk dari BPS Jakarta apakah Sampel tersebut harus diganti dengan perusahaan konstruksi lainnya atau tidak perlu.	Sudah dilaporkan ke BPS Jakarta untuk sementara tetap dicacah sebagai Sampel di Sektor Perdagangan.	
3.	Rata-rata setiap tahun jatah Innas yang boleh mengajar Susenas Modul sebanyak 2 orang sementara NTT dengan wilayah kepulauan sulit mengumpulkan petugas Modul hanya pada 2 TC (kedalah musim dan transportasi). Demikian halnya dengan perpindahan Innas antar TC.	Diminta tambahan jatah Innas yang berhak mengajar Susenas Modul dengan jumlah sesuai kebutuhan untuk 4 TC walaupun mungkin jumlah petugas modul sedikit.	
4.	Biaya untuk pelatihan Pengolahan Susenas KOF di Kabupaten/Kota tidak tersedia.	Sesuai dengan kondisi geografis NTT, BPS diharapkan mengalokasikan biaya untuk pelatihan Pengolahan Susenas KOR di BPS Kabupaten/Kota	
61. Kalimantan Barat			
	STATISTIK KESRA		
1.	Pelaksanaan Susenas 2003 yang dimulai pada bulan Desember 2002/Januari 2003, dari	Memberitahukan ke BPS Kab/Kota kemungkinan akan ada keterlambatan dalam pembayaran upah. Hal ini juga diminta	Biro Bina Program

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	sisi penyediaan upah pencacahan terasa sangat sulit karena awal tahun anggaran.	pengertiannya ke petugas Mitra.	
2.	Alokasi sampel yang terpilih pada desa yang sulit transportasi dari ibu kota kecamatan, sehingga memerlukan biaya yang tinggi.	Ganti alokasi sampel.	Dirut Metodologi
3.	Sebaran alokasi sampel per kecamatan yang relatif tinggi variasinya, menyebabkan kebutuhan petugas yang banyak sedangkan penyediaan petugas terbatas.	Ganti sampel.	
4.	Kecamatan Kuala Marpor B di alokasi sampel masuk ke Kabupaten Landak, seharusnya kecamatan tersebut masuk ke Kab.Pontianak.	Dikoordinasikan dengan kab ybs untuk relokasi sampel.	
5.	SDKI dan SKRRI Sebaran sampel yang jauh dari ibu kota kecamatan, transportasi kendaraan umum tidak ada. Modal angkutan yang ada hanya angkutan air. Konsekuensinya adalah membutuhkan biaya transportasi yang tinggi.	Ke petugas pendata (mitra) diberitahukan bahwa penyediaan biaya transportasi sangat terbatas. Ada kemungkinan sebagian upah pencacah akan digunakan untuk tambahan biaya transportasi. Pada pelaksanaannya ternyata hal ini terbukti bahwa penyediaan biaya operasional lapangan tidak mampu untuk mengatasi biaya transportasi keseluruhan.	
6.	Disarankan untuk masa yad. agar penyediaan biaya penunjuk jalan lebih dari 1 orang. Asumsinya petugas penunjuk jalan adalah KSK dan Kepala Desa/dusun atau RT/RW.	Pada pelaksanaan jika ditemui kasus demikian, diberikan biaya penunjuk jalan lebih.	
7.	KEPENDUDUKAN a. Hasil inventarisasi aporan BPS Kabupaten/Kota (sumber informasi Mantis), secara rata-rata penyelesaian pendataan P4B s/d tgl. 30 April 2003 di	Monitoring terus perkembangannya secara berkala (mingguan), tekankan ke petugas P4B (PDL, PML, PKTK, dan KTK) untuk dapat memanfaatkan waktu seefisien mungkin dan batas akhir pendataan P4B adalah tetap berakhir tgl. 30 April 2003.	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Kalimantan Barat diprediksi sekitar 35% di tingkat PDL, dan baru sekitar 40% di tingkat PML. Kendala-kendala apangan diantaranya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Awal persiapan, secara umum jumlah petugas P4B relatif lebih sedikit dibanding SP2000, sisi lain cakupan variabelnya lebih banyak P4B. Sehingga rata-rata setiap PDL dibebani 3 BS pesimis dapat menyelesaikan pendataan tepat waktu. - Jumlah petugas sedikit, jadwal 1 bulan, sebaran penduduk sangat jarang, dan kondisi geografis atau jarak rata-rata antar BS maupun antar desa umumnya berjauhan, serta ketersediaan sarana dan prasarana transportasi secara umum belum baik, merupakan penghambat utama pendataan P4B tepat jadwal. 	<p>Mantan petugas SP2000 yang terbukti berkualitas dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas tepat jadwal utamakan untuk direkrut dalam P4B.</p> <p>BPS Propinsi mengusulkan penambahan jumlah petugas ke BPS pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan minimum masing-masing daerah dengan menggunakan dasar hitung (1 desa = 1, 2, 3 BS dibutuhkan minimum 1 PDL; 1 desa = 4, 5, 6, 7 BS dibutuhkan minimum 2 PDL; dst).</p> <p>BPS Kabupaten/Kota diharap proaktif mengajukan proposal penambahan dana ke Pemerintah Daerah masing-masing yang utamanya untuk menambah jumlah petugas (PDL), dsb bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyelesaian P4B tepat waktu.</p> <p>BPS Kabupaten/kota diharap melakukan penambahan jumlah petugas (PDL), dengan memanfaatkan dana bantuan Pemda.</p> <p>Petugas P4B diupayakan direkrut dari penduduk desa setempat agar operasionalnya lancar.</p> <p>Lakukan wawancara dengan ART dewasa yang masih berada di rumah. Jika tidak ada ART dewasa yang dapat memberikan keterangan, harus dilakukan kunjungan ulang. Buat janji atau menitip pesan dengan ART atau tetangga terdekat, sebelum tanggal 30 April 2003 kapan responden dapat meluangkan waktu untuk dapat diwawancarai PDL.</p> <p>Selain dengan KPUD, lakukan koordinasi dengan Pemda dalam rangka sosialisasi (bantuan instruksi berjenjang) s.d tingkat desa/kelurahan, dusun/kampung</p>	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> - Cuaca, musim penghujan bulan April adalah musim tanam. Petugas sulit menemui responden petani pada pagi hari. Dalam bercocok tanam, umumnya petani menginap di ladang dan setelah seminggu atau 2 minggu kemudian baru pulang, itupun hanya beberapa hari lantas kembali pergi hingga selesai bertanam. Efektivitas waktu pendataan berkurang karena sulit menemui responden maupun gangguan cuaca. - Secara umum masyarakat perdesaan belum banyak tahu adanya kegiatan P4B, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi, terbatasnya media informasi juga menghambat proses pendataan. - Beberapa petugas mengundurkan diri setelah pelatihan, dan diantaranya ada yang mengundurkan diri setelah mendata sebagian muatan BS (1 BS belum selesai). - Hampir semua BPS Kab./Kota kekurangan dokumen pelaksanaan khususnya KPU-SD dan KPU-KL. Bahkan Kabupaten 	<p>maupun RT/RW agar warga masyarakat mengetahui dan mengenali kegiatan, manfaat, tujuan, dan pentingnya P4B.</p> <p>Back up oleh PML atau digantikan oleh PDL lain yang telah menyelesaikan beban tugasnya, atau digantikan dengan petugas baru yang telah dilatih kilat.</p> <p>Segera mengirim surat permintaan maupun tambahan dokumen ke KPU Pusat yang ditembuskan ke BPS Propinsi, KPUD, dan BPS Pusat sebagai laporan. Untuk kelancaran pendataan, pinjam sementara kepada BPS kabupaten terdekat yang memungkinkan.</p> <p>Masih dibenarkan daripada tidak terisi sama sekali (kosong).</p>	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Sanggau tidak sama sekali menerima kiriman KPU-WB.</p> <p>- Ditemui banyak daerah perdesaan di Kalimantan Barat yang masyarakatnya berpandangan "tabu" menyebut nama orang tua laki-laki maupun perempuan yang sudah meninggal. PDL dalam melengkapi isian daftar KPU-KL berupaya menanyakan pada tetangga terdekat yang mengetahui nama lengkap atau panggilan orang tua responden dimaksud.</p>		
8.	<p>Realisasi pemasukan dokl. men Survei Upah triwulanan maupun tahunan tidak tepat jadwal, bahkan terkadang tidak masuk sama sekali. Hal ini utamanya disebabkan oleh keengganan perusahaan sampel mengisi atau terlambat mengisi daftar. Selain itu, juga karena adanya survei-survei BPS lainnya pada perusahaan sampel yang sama.</p>	<p>Staf BPS Kabupaten/kota disarankan untuk membantu/mendampingi Mantri Statistik ke perusahaan sampel guna menjelaskan berbagai aspek teknis maupun non teknis, dan sasaran akhir dari masing-masing survei BPS, serta optimalkan dana pengawasan lapangan secara terintegrasi.</p>	
9.	<p>Pemasukan Dokumen Sakemas Triwulanan dari BPS Kabupaten/Kota sering terlambat dari jadwal yang ditetapkan.</p>	<p>Melakukan teguran/tagihan rutin tertulis maupun lisan ke BPS Kabupaten/Kota dan diinstruksikan untuk segera ditindaklanjuti kepada Mantri Statistik. Tagihan tertulis dilakukan secara periodik (mingguan/ 2 mingguan) sejak memasuki bulan pengiriman ke BPS Pusat, dan selalu ditembusan ke BPS Pusat sebagai laporan.</p>	
	<p>- Keterlambatan paling Tenggang waktu pengiriman daftar</p>		

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	menonjol terjadi pada Sakernas Triwulan I, dimana pengiriman daftar sampel dari BPS pusat tergolong rapat dengan jadwal pencacahan.	sampel dari BPS pusat diharapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum bulan pencacahan (listing), termasuk pengiriman kuesioner. Hal ini utamanya untukantisipasi penggantian sampel daerah sulit.	
	- Tidak semua Mantis dapat setiap bulan datang ke BPS kabupaten karena kondisi geografis yang tergolong sulit dan minimnya sarana transportasi. Sisi lain tidak semua kecamatan terpilih sakernas triwulan ada mantisnya	Daftar sampel dan kuesioner agar dititipkan kepada Mantis kecamatan terdekat atau pegawai instansi/institusi lain yang ke kabupaten. Kegiatan tetap harus jalan, baik dilakukan atau dirangkap oleh mantis kecamatan terdekat, staf BPS Kabupaten, dan atau mitra statistik yang sudah pernah mengikuti pelatihan dan pencacahan Sakernas atau Susenas.	
10.	Beberapa sampel Sakernas triwulan maupun tahunan berlokasi jauh dari ibukota kecamatan (daerah sulit), sisi lain dalam pendataan tidak tersedia dana operasional yang memadai.	BPS Kabupaten./Kota disarankan untuk mengusulkan penggantian sampel yang sekaligus memberi masukan beberapa alternatif sampel pengganti guna mendukung kelancaran pelaksanaan dan pemasukan dokumen.	
11.	Realisasi pemasukan dokumen Sakernas Tahunan juga sering terlambat dan tidak tepat jadwal.	BPS Propinsi membuat surat tagihan/teguran ke BPS Kabupaten/Kota secara berkala (mingguan/ 2 mingguan) yang selalu ditembuskan ke BPS Pusat sebagai laporan.	
12.	Data yang secara khusus mengungkap masalah ketenagakerjaan satu-satunya adalah bersumber dari Sakernas, dan diduga akan semakin banyak diperlukan oleh daerah, terutama dalam upaya evaluasi ketenagakerjaan dan mutu SDM per kabupaten/kota. Berkenaan dengan itu,	BPS kabupaten/kota diharapkan dapat menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menambah jumlah sampel sakernas (SAKERDA) yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan pelaksanaan sakernas tahunan.	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	diharapkan jumlah sampelnya diperbesar sehingga dapat mentabulasikan s/d tingkat kabupaten/kota.		
13.	<p>Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah ke depan, Pemerintah Daerah perlu dukungan ketersediaan data penduduk tahun berjalan dan beberapa tahun ke depan pasca sensus penduduk. Namun data proyeksi yang dihasilkan BPS daerah jauh lebih rendah dibanding angka BPS Pusat misalnya dalam tabulasi Susenas maupun Sakernas.</p>	<p>Hingga saat ini ada perbedaan angka final hasil SP2000 (non respon) antara BPS Pusat dan BPS daerah. BPS daerah dalam menghitung (proyeksi) jumlah penduduk beberapa tahun ke depan, selain berpedoman pada LPP periode 1990-2000, juga memperhatikan fenomena sosial yang biasa berlaku di masing-masing daerah kabupaten maupun kota misalnya Kabupaten Sambas, serta tidak memasukkan angka non respon BPS Pusat yang sekitar 283.403 yang secara khusus terdapat di Kabupaten Landak. Angka non respon tersebut diragukan kebenarannya dan diduga terjadi duplikasi dalam proses pengolahan (Publikasi Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 Seri: L2.2.19 BPS Jakarta).</p>	
14.	<p>HANSOS</p> <p>Muatan pertanyaan relatif banyak dan cukup detail, dilain sisi aparat desa baik dari jumlah (<i>kuantitas</i>) maupun kemampuannya (<i>kwalitas</i>) terbatas serta sebagian besar pencatatan administrasi desa kurang baik dan lengkap. Contoh : pertanyaan berkaitan dengan jumlah penduduk yang menganggur, luas lahan, produksi dan potensi komoditi, mutasi lahan dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dianjurkan agar berkoordinasi dengan instansi terkait yang berada di desa/kecamatan, misalnya mantri tani, PPL peternakan dll. - Bagi desa yang terjangkau disarankan melakukan kunjungan ulang - Memanfaatkan dana pengawasan lapangan semaksimal mungkin 	
15.	<p>Beberapa kendala di lapangan yang berpengaruh terhadap keterlambatan pemasukan dokumen terutama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada beberapa desa adanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan mitra yang berasal dari aparat kecamatan. Pengiriman dokumen hasil pencacahan dilakukan pada waktu pengambilan gaji bulanan atau melalui aparat kecamatan/desa yang melakukan perjalanan ke 	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>kesulitan transportasi yg disebabkan : jarak antar desa cukup berjauhan, medan (jalan) yang kurang layak serta biaya transpor yang cukup mahal. Ditinjau sisi, adanya keterbatasan petugas (rata-rata 1 petugas=6 desa).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada beberapa desa juga jarak ke kecamatan yang cukup jauh, menyulitkan untuk koordinasi dan pengiriman dokumen hasil pencacahan. - Biaya operasional lapangan pada desa tersebut, dibandingkan dengan upah pencacahan maka sangat kurang sebanding. 	<p>kecamatan.</p> <p>Memaksimalkan penggunaan anggaran untuk daerah terpencil, walaupun dari sisi besaran dananya terbatas.</p>	
16.	<p>Faktor lain yang menghambat pengisian dokumen terutama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pemekaran desa berakibat pada administrasi desa yang juga harus dipecah, bagi desa lama maupun desa baru pencatatan administrasi desa cukup menyulitkan. Apalagi desa yang tidak memiliki administrasi yang baik. - Penggantian kepala desa yang tidak disertai dengan lengkapnya administrasi desa 		

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	periode sebelumnya cukup menyulitkan petugas dalam mendapatkan data yang cepat dan akurat.		
17.	Kekosongan mantis pada beberapa kecamatan juga berpengaruh terhadap keterlambatan pemasukan dokumen.	Dianjurkan ke Kabupaten/kota agar menggunakan mitra yang berasal dari desa/kecamatan setempat.	
18.	Dalam melaksanakan tugas seksi hansos berpedoman pada "pedoman kegiatan statistik hansos" yang diperoleh dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Berdasarkan pedoman tersebut, betapa luas cakupan hansos baik perolehan data ataupun analisisnya. Dilain sisi tugas rutin lapangan hansos (selain PODES) yang bersumber dari pendanaan BPS tidak ada. Dengan kata lain hansos yang baru lahir dituntut untuk mandiri. Harapan kedepannya agar adanya kesamaan format kuesioner dan juga analisis publikasi khususnya data sekunder antar daerah, kalau bisa agar pusat merancang minimal satu kegiatan rutin lapangan.	Langkah yang diambil di Daerah : a. Berupaya menginventarisasi data dengan prioritas data primer baik dari PODES maupun Susenas. b. Mengumpulkan data sekunder semaksimal mungkin yang diintegrasikan dengan kegiatan lain. c. Membuat satu format publikasi (analisis) yang diharapkan bermanfaat bagi daerah agar tahun depan dapat diusulkan bantuan dana dari APBD.	
19.	Sejak tahun 2002, BPS Pusat tidak lagi mer supply dokumen kriminalitas ke daerah. Hasil Evaluasi tahun 2003, terdapat beberapa kabupaten/kota yang tetap melakukan percobaan dengan biaya swadaya. Jika kegiatan tersebut dihentikan, sangat	- Propinsi menyerahkan ke kabupaten/kota masing-masing.	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>diseyapkan karena koc dinasi untuk mendapatkan data dengan instansi terkait telah terjalin lama. Artinya jika dihentikan akan menyulitkan koc dinasi selanjutnya jika data tersebut diperlukan.</p>		
62. Kalimantan Tengah			
1.	<p>Pengawasan/Pemeriksaan Belum Efektif Di dalam pelaksanaan survei, masih banyak ditemui dokumen (daftar isian) yang masih tidak lengkap atau tidak konsisten antar variabel (item-item pertanyaan), malah masih ditemui yang masih kosong sama sekali</p>	<p>Perlunya koordinasi antara Kabid Stat Sosial, Ka BPS Kabupaten/Kota, Kasi Stat Sosial BPS Kabupaten/Kota dengan pengawas lapangan.</p>	<p>Ya, akan lebih baik bila dilaksanakan secara terpadu</p>
2.	<p>Banyak buku/publikasi yang dihasilkan BPS khususnya di Bidang Statistik Sosial belum pas sasaran. Hal ini disebabkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari sisi analisis Tenaga di Bid Stat. Sosial di dalam menampilkan publikasi masih kurang tajam. Sebagai contoh penampilan angka indikator tetapi yang di tampilkan adalah profil atau data dasar 2. Dari sisi pengolahan Masih banyak kendala di dalam pembuatan/ pengolahan data dengan program-program aplikasi seperti Fox Pro, Visual Data Base dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> - BPS Pusat menerbitkan buku paduan baku tentang pedoman penghitungan atau bagaimana menentukan indikator-indikator - BPS Pusat mengadakan pelatihan komputer tentang program-program aplikasi seperti Fox Pro, Visual Data Base dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada beberapa buku , diantaranya yang digunakan dalam pelatihan pemanfaatan Data Susenas, kerjasama dengan UNFPA th 1999 - Puslatikom BPS sudah melaksanakannya, mestinya staf yg mengikuti pelatihan diwajib-kan memberikan pengetahuannya kepada yang lain.
3.	<p>Banyaknya permintaan data tentang Penduduk Miskin / Angka</p>	<p>- BPS Pusat menerbitkan buku paduan baku tentang formula atau pedoman penghitungan atau</p>	<p>Bukankah buku panduan penghitungan penduduk miskin sudah lama ada di daerah?</p>

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kemiskinan	bagaimana menentukan indikator-indikator	
4.	Banyak kegiatan lapangan dari Bidang Statistik Sosial yang mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) wilayah yang terkena sampel cenderung menunda-nunda untuk melaksanakan pencacahan sesuai dengan jadwal yang ditentukan	BPS Propinsi melakukan pembinaan dengan melakukan pendekatan dan menyadarkan kepada KSK bersangkutan untuk lebih loyal dengan kegiatan-kegiatan statistik.	Ya, seharusnya demikian. Tentunya BPS Propinsi harus memberikan contoh yang baik.
5.	Dalam pelaksanaan tentang UU Otonomi Daerah, dimana konsumen BPS sekarang adalah level Kabupaten/Kota atau Kecamatan. Hal ini BPS dituntut untuk memperluas cakupan sampel rumah tangga, sehingga data yang dihasilkan BPS dapat dimanfaatkan tidak hanya sampai level Kabupaten/Kota tetapi pada level Kecamatan	Melakukan pendekatan/ negosiasi dengan Pemda Setempat untuk mencari dana penambahan sampel, sehingga data yang dihasilkan bisa mewakili sampai tingkat kecamatan	Penambahan sampel untuk mendapatkan data kecamatan tergantung usaha BPS Daerah ke Pemda
63. Kalimantan Selatan			
1.	Blanko pencatatan Registrasi Penduduk tidak lagi mendapat kiriman dari BPS Pusat sedangkan pelaksanaannya masih berlanjut. Apakah kegiatan ini masih tetap berlanjut/tidak	Kegiatan registrasi penduduk masih tetap dilaksanakan meskipun format blankonya diprint dengan format sendiri (excell)	Pengadaan blanko tidak di Pusat lagi, disediakan oleh masing-masing daerah, format mengikuti daftar terdahulu. Daerah tetap mengirim file kompilasi pengolahan.
2.	Pelaksanaan Sakernas Triwulan waktu pencacahannya sangat singkat sehingga persentase pemasukan dokumennya sangat rendah apabila mengacu pada batas akhir jadwal yang ditetapkan	Menekankan kepada BPS Kab/Kota dan petugas untuk segera melakukan pencacahan diawal waktu sehingga dapat mengejar target waktu	Jadwal pelaksanaan Sak. Triwulan memang sangat ketat karena datanya harus disajikan pada triwulan berikutnya

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Pelaksanaan Survei Upah Buruh (SUB) dan Survei Struktur Upah (SSU) cukup mengalami kendala pemasukan dokumennya dikarenakan tingkat kesulitan dari responden sangat besar	Menekankan kepada BPS Kab/Kota dan petugas untuk segera melakukan pencacahan di awal waktu serta dapat membina hubungan baik dengan responden khususnya terhadap perusahaan besar yang tingkat non respon nya besar	Setuju
4.	Mutu hasil pencacahan Suse nas semakin menurun	Hendaknya pelaksanaan pengawasan oleh BPS Kabupaten/kota bertepatan dengan pelaksanaan pencacahan oleh petugas lapang, sehingga apabila aterjadi kesalahan teknis dapat segera diatasi.	Seharusnya daerah menyusun pengawasan terpadu
5.	Upah untuk petugas Suse nas selalu terlambat karena pelaksanaan lapangan lebih awal dari pada pembahasan anggaran.	Diusulkan ke BPS Pusat jika memungkinkan, hendaknya pelaksanaan lapangan digeser atau BPS Pusat mempersiapkan dana talangan.	Dipertimbangkan/dikaji kembali
6.	Program entry Suse nas masih sering bermasalah	Program hendaknya diuji coba dahulu sebelum dikirim.	Diupayakan penyempurnaan-nya, walaupun uji coba sudah dilakukan beberapa kali
7.	Data dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan di BPS Propinsi Kalimantan Selatan tetap dikumpulkan meskipun BPS Pusat tidak lagi memberikan kewajiban. Untuk: memudahkan pengolahan data tersebut dapatkah BPS Pusat memberikan program pengolahannya (kalau ada), baik untuk data dari pengadilan (PN1 dan PN2), kejaksaan (LT1 dan LT2) dan dari lembaga pemasyarakatan (LP1 dan LP2	Akan dikonfirmasi dulu ke BPS Pusat	Data LP dan PN masih diperlukan oleh berbagai pihak, namun oleh karena data dimaksud sebagian besar sudah dapat diperoleh dari instansi terkait baik di level Kab/Kota, Prov. maupun Pusat, maka dipandang tidak perlu lagi mengumpulkan data melalui instrumen LP-1/2 dan PN-1/2 sebagaimana telah diputuskan beberapa waktu yl.
64. Kalimantan Timur			
P4B			
1.	Kekurangan Dokumen (KPU-KL; -SD; Stiker) dan komplain terhadap kekurangan tersebut lambat dipenuhi oleh pihak KPU	<ul style="list-style-type: none"> - Pencacahan dilapangan sementara menggunakan fotocopy KPU-KL hingga dokumen kekurangan diperoleh. - Untuk KPU-SD diperbanyak dengan mengcopy atau mencetak dg 	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
		menggunakan <i>continous form</i> dan digandakan di daerah masing-masing.	
2.	Mualan pertanyaan KPU-KL cukup rumit dan membutuhkan waktu lama untuk pengisiannya, sedangkan umumnya rt tidak siap dengan berkas / dokumen pendukung pengisian pertanyaan tersebut. Sehingga setiap petugas yang sedianya dapat menyelesaikan 3 BS diperkirakan hingga selesai jadwal pelatihan hanya dapat menyelesaikan 2 BS.	<ul style="list-style-type: none"> - Meskipun waktu pencacahan telah berakhir, diminta petugas tetap menyelesaikan pendataan lapangan dengan melakukan penyisiran terhadap penduduk yang belum terdata. - Melakukan supervisi dan monitoring terintegrasi yang melibatkan badan/ instansi terkait. Membentuk tim koordinasi per wilayah yang bertanggung jawab secara teknis dan administrasi. - Petugas tetap melaksanakan tugas dengan ditunjang biaya operasional daerah sulit. 	
3.	Kondisi geografis dan letak bangunan rt yang berjauhan terutama di daerah aliran sungai, daerah pedalaman dan perbatasan. Untuk mencapai daerah tersebut dibutuhkan waktu dan alat transportasi tertentu.		
4.	Tercapat masyarakat di wilayah/daerah tertentu (Jl. Poros Bontang Sangatta) yang tidak mau didata pada wilayah dimana mereka berdomisili dengan alasan tidak ada kejelasan <i>de jure</i> wilayah tersebut (dalam proses pemekaran wilayah).	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pertemuan khusus antara pemda Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur, dan disepakati masyarakat tetap didata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	
5.	Berdasarkan catatan Badan Meteorologi di kab/kota pada bulan Apr 2003, hujan terjadi hampir setiap hari dan	<ul style="list-style-type: none"> - Meskipun pelaksanaan lapang terkendala te-tapi beberapa petugas tetap melaksanakan pendataan secara optimal. 	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	merata di seluruh kab/kota.		
6.	Terdapat mitra statistik yang mengundurkan diri.	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta bantuan tambahan petugas PDL kepada Pemda setempat. - Menginstruksikan petugas PML juga berperan sbg petugas PDL 	
7.	<p>SUSENAS</p> <p>Jumlah sampel Susenas 2003 banyak yang diganti karena keterbatasan biaya operasional untuk sampel sebanyak 34 sampel. Setelah diteliti sampel terpi-lih adalah sampel yang ter-masuk BS elit/sulit sebagai-mana daftar yg telah disar-paikan ke Direktorat Meto-dologi Statistik BPS Pusat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diharapkan agar BPS / Pusat dalam penetapan sampel kegiatan Susenas selanjutnya telah mengeluarkan BS elit/sulit agar tidak terjadi usulan pergantian sampel. 	Barangkali perlu dirumuskan kembali dan dipertimbangkan dengan matang apabila yang dimasukkan sebagai daerah sulit persentasenya cukup tinggi.
8.	Kegiatan Modul Konsumsi dan Kor-Modul MSBP telah mencapai 100%. Namun entry data mengalami hambatan karena terdapat 2 kab/kota yang mengalami kerusakan komputer.	<ul style="list-style-type: none"> - Entry data Susenas Kab/kota yang menga-lami kerusakan kompu-ter sebagian dilaksana-kan oleh BPS Propinsi. Dan diharapkan agar BPS / Pusat mengupa-yakan pengadaan PC dan perlengkapannya untuk BPS Kab/Kota dalam rangka menunjang kegiatan BPS di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kab/Kota mana yang susah? Mudah-mudahan komputer pengadaan P4B dapat membantu kekurangan komputer daerah.
9.	<p>PODES ST</p> <p>Luas wilayah menurut penggunaan tidak diketahui oleh responden dengan pasti, karena selama ini belum pernah dilakukan pengukuran. Ketidakpastian tsb mengakibatkan sebagian besar kepala desa tidak mau menandatangani dokumen Podes-ST03 apabila luasan wilayahnya hanya merupakan perkiraan termasuk <i>item</i> jumlah penduduk menurut lapangan usaha.</p> <p>SAKERNAS Triwulan dan Tahunan 2003</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sepanjang tidak ada perubahan wilayah maka data luasan desa diperoleh dari rekapitulasi luas desa hasil pendataan sebelumnya. 	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Pemasukan dokumen dari Kabupaten/Kota ke BPS Propinsi masih sering terlambat.	- Telah dilakukan evaluasi agar segera mengirimkan hasil pelaksanaan lapangan ke BPS Propinsi secara bertahap.	
11.	Upah pencacahan sebesar Rp. 3.000,- responden tidak layak dibandingkan dengan usaha yang dilakukan petugas untuk melakukan pencacahan terhadap responden.	- Diusulkan ke BPS untuk dapat ditingkatkan upah pencacahannya.	
7.1. Sulawesi Utara			
1a.	Susenas merupakan kegiatan rutin BPS setiap tahun, pada saat ini terlihat kualitas isian cenderung semakin menurun.	Untuk mengantisipasi hal tersebut mohon agar penyusunan Petunjuk Operasional (OP) pada P2S dapat memasukkan rincian mata anggaran untuk Pengawas BPS Propinsi terhadap petugas lapangan.	
1b.	Hasil Pengolahan Modul Komsumsi yang dikeluarkan oleh BPS Pusat sudah banyak membantu para pengguna data, akan tetapi di satu pihak belum dapat memenuhi permintaan pemda dalam hal pengentasan kemiskinan terutama dengan adanya bantuan untuk GAKIN (Keluarga Miskin)	Disarankan agar BPS Pusat dapat memberikan petunjuk sehingga BPS Daerah dapat memenuhi kebutuhan Pemda tersebut.	
1c.	Setiap pelaksanaan survey, Kabupaten Sangihe dan Talaud selalu mengalami keterlambatan dalam pemasukan hasil survey karena sulitnya transportasi	Mengusulkan agar BPS khususnya Direktorat Metodologi Statistik dapat menentukan wilayah/ blok sensus terpilih pada daerah yang tidak terlalu menyulitkan	
2.	Survey Upah yang dilaksanakan sekarang ini belum dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan untuk pembahasan penentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) di daerah	Penentuan sampel oleh BPS terhadap perusahaan terpilih diharapkan mewakili semua sektor berdasarkan KLUI	BPS Pusat saat ini sedang mengkaji ulang untuk perbaikan alokasi sample survei upah.
3.	Selama ini Blanko Registrasi Penduduk	Mohon agar BPS memberikan penegasan apakah masih perlu	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	tidak ada lagi pengiriman dari BPS Angkatan kerja pada tingkat Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan akan tetapi hal tersebut tidak dapat terpenuhi	dilakukan pengumpulan data registrasi penduduk yang diperinci menurut desa/kelurahan Menambah jumlah sampel agar representatif pada tingkat kabupaten/kota	Untuk memunculkan angka Kab/Kota diserahkan ke BPS tk II untuk menambah sampel (budget)
72. Sulawesi tengah			
1.	Jumlah Penduduk Sulawesi Tengah SP2000 yang non respon (sementara) berdasarkan publikasi Seri L2.2.24 sama dengan jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penduduk hasil Survei lain di kabupaten tersebut, yang jumlahnya 2 kali dari hasil lapangan SP2000.	Perlu penjelasan mengenai penduduk non respon.	
2.	Saat ini kegiatan pengumpulan data Registrasi Penduduk terhenti karena droping Daftar RPT/RPA dari BPS Pusat dihentikan sejak Tahun 1999. Sementara daerah masih membutuhkan data tersebut.	Perlu kejelasan apakah kegiatan Registrasi Penduduk tetap dilakukan, dan BPS Pusat tetap mengirimkan ke BPS Propinsi Daftar RPT/RPA	
3.	Permintaan data sekunder ke Instansi di daerah dari BPS Pusat tanpa sepengetahuan atau kordinasi dengan BPS Daerah. BPS Daerah diberitahu bila data tersebut belum dipenuhi.	Setiap permintaan data sekunder secara langsung ke Instansi di daerah dapat dilakukan namun paling tidak ada tembusannya ke BPS Daerah.	
4.	Jumlah penduduk hasil Susenas 2002 sangat tinggi, hal ini mengakibatkan sulitnya untuk membuat publikasi.	BPS membuat penimbang baru dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan penduduk.	Yang dipakai untuk Susenas adalah angka proyeksi berdasarkan hasil SP2000
5.	Pembayaran Susenas 2002 sampai saat ini belum tuntas, antara lain biaya koordinator	Mengkopi pertinggal SPJ dan mengirimkannya ke BPS Pusat.	Mungkin ada yang tercecer di jalan. Daerah diminta mengirim pertinggalnya.

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	kab/kota untuk SGY dan Wisnus serta biaya receiving data untuk SGY. Informasi dari BPS Pusat menyatakan bahwa SPJ belum dikirimkan padahal SPJ sudah lama dikirimkan. Data hasil SGY 2002 belum diterima dari BPS Pusat, padahal sangat diperlukan untuk publikasi daerah.	Menyurat ke BPS Pusat.	Disampaikan kepada Kabid. Stat. Sosial pada Ratek.
7.	Rate pelatihan petugas Susenas sangat kecil.	Menambah pusat pelatihan dari 2 (dua) tahun 2002 menjadi 3 (tiga) tahun 2003.	Sesuaikan dengan biaya tersedia.
8.	Publikasi Podes ST 2003 Pusat sampai saat ini belum terbit sehingga publikasi daerah juga belum terbit	Daerah yang sudah dicek di BPS Pusat dan dinyatakan tidak bermasalah agar diinformasikan ke daerah agar publikasi dapat diterbitkan	
9.	Pelaksanaan kegiatan proyek terutama kecamatan yang tdk memiliki KSK dan yang menggunakan mitra sering mengalami keterlambatan karena lokasi sampel sangat sulit serta komunikasi terbatas.	Menggunakan biaya daerah sulit, jika tidak cukup agar BPS Kab/Kota segera mengusulkan penggantian sampel.	
10.	Beban tugas PDL pada P4B dengan 3 BS per PDL dan 5 PDL per PML sangat berat.	PDL/PML yang sudah menyelesaikan tugasnya membantu PDL/PML yang belum menyelesaikan tugas.	
11.	Daftar tambahan seperti KPU-SD dan stiker sangat lambat dan jumlahnya tidak sesuai dengan permintaan daerah.	Kekurangan daftar dan stiker diganda-kan daerah sambil menunggu dropping KPU.	
73. Sulawesi Selatan			
1.	Otonomi daerah mengakibatkan kebutuhan data sampai wilayah terkecil semakin meningkat, sehingga muncul berbagai survei termasuk Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) yang memerlukan penarikan sampel blok sensus yang lebih cepat dan sesuai dengan	Diusulkan agar penarikan sampel blok sensus didelegasikan ke BPS daerah (BPS Propinsi)	Akan dibahas dengan Direk-torat Metodologi Stat.

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	metodologi yang dilakukan pada Susenas. Setiap survei yang dilakukan selalu ada kegiatan penyalinan/pembuatan sketsa peta blok sensus untuk keperluan pencacahan.	Perlu dianggarkan pengadaan blanko sketsa peta dan biaya penyalinan/pembuatan sketsa peta pada setiap survei.	Diusulkan
3.	Setiap awal tahun pemerintah daerah senantiasa membutuhkan data penduduk miskin serta besarnya nilai batas kemiskinan (dalam rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - BPS perlu secara rutin mengadakan data kemiskinan. - Dialokasikan anggaran untuk pelatihan personil, khususnya yang berkaitan dengan penghitungan penduduk miskin, Indeks Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Indikator Jender. 	Karena anggaran pemerintah saat ini terbatas, maka BPS mencoba mencari dana dari lembaga internasional, namun hasilnya sangat terbatas
4.	Data Susenas diupayakan terbit pada setiap tahun survei, namun terbitan BPS selalu terlambat. Keterlambatan dari BPS pusat mengenai penetapan angka final, sehingga BPS propinsi melakukan tabulasi data sesuai inflation factor yang dihitung di daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu antisipasi dari BPS agar hasil Susenas dapat terbit lebih cepat. - Daerah agar diijinkan melakukan tabulasi data sesuai inflation factor yang dihitung di daerah. 	Mudah-mudahan faktor pengali dapat tersedia tepat waktu
5.	Daerah perlu data hasil Sakernas semesteran	Agar dapat disajikan angka nasional dan propinsi, paling tidak untuk Sulsel	Tidak masalah hanya perlu kehati-hatian mengingat ada Susenas yg sampelnya lebih besar
74. Sulawesi Tenggara			
1.	Pengumpulan data LP1,2 dan PN1,2 yang dilakukan setiap bulan upahnya sangat minim dibanding biaya transport. Dokumennya tidak pernah lagi didrop dari BPS Pusat.	Kalau datanya masih diperlukan, agar upahnya dinaikkan, karena kunjungannya dilakukan berkali-kali.	Data LP dan PN masih diperlukan oleh berbagai pihak, namun oleh karena data dimaksud sebagian besar sudah dapat diperoleh dari instansi terkait baik di level Kab/Kota, Prov. maupun Pusat, maka dipandang tidak perlu lagi mengumpulkan data melalui instrumen LP-1/2 dan PN-1/2 sebagaimana telah diputuskan beberapa waktu yg
2.	Registrasi penduduk, konsimen datanya cukup banyak, tetapi blanko sudah tidak didrop lagi dari BPS Pusat dan banyak KSK baru yang belum paham cara pengisian daftar.	Perlu penyegaran untuk tehnik pengisiannya terutama bagi KSK baru dan blanko disediakan oleh BPS Pusat.	Pengadaan blanko tidak di Pusat lagi, disediakan oleh masing-masing daerah, format mengikuti daftar terdahulu. Daerah tetap mengirim file kompilasi pengolahan.

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Kabupaten Muna</u>			
3.	Hasil akhir setiap sensus atau survei terutama yang sampelnya sangat kecil adakalanya menggambarkan keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan (sebenarnya).	Sebelum hasil sensus dan survei dipublikasikan terutama yang sampelnya kecil sebaiknya mengundang BPS Kabupaten/Kota minimal subject matternya guna meminimalisasi tingkat kesalahan (error).	Seyogyanya BPS Kab/Kota terlebih dahulu meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
4.	Dalam pelaksanaan Susenas beban petugas dan pencacah sangat berat karena pengawas/pemeriksa membawahi 4 petugas sedangkan pencacah adakalanya melaksanakan 4 blok sensus.	BPS diharapkan memikirkan perbandingan beban tugas yang dipikul oleh pengawas dan pencacah serta perbandingan pengawas dengan jumlah pencacah yang diawasi, apalagi Susenas sangat berat pekerjaannya karena pencacah mengerjakan beberapa jenis dokumen.	Di dalam perencanaan anggaran 1 petugas dialokasikan untuk 2 BS, mengapa sampai ada yang mendapat 4 BS
5.	Blanko (Daftar PN1) tidak mencukupi untuk pelaksanaan dalam satu tahun karena dalam tiap bulan sangat ditentukan oleh banyaknya perkara yang diputuskan.	Diharapkan alokasi dokumen daftar PN1 tiap bulan dirata-ratakan 5 lembar, jika berlebihan nanti digunakan untuk pelaksanaan tahun berikutnya.	
6.	Sebagian responden P4B susah diketemukan karena masih menjaga tanaman padi, jagung sampai panen.	Meminta bantuan kepala desa/kelurahan untuk memanggil masyarakatnya kembali ke rumahnya supaya dicacah oleh petugas P4B.	
7.	Banyak petugas kekurangan KPU-KL, KPU-SD dan stiker P4B.	Petugas disarankan untuk melakukan pencacahan dengan buku pembantu sambil menunggu dokumen tiba dari KPU Pusat.	
<u>Kabupaten Kolaka</u>			
8.	Merekrut petugas khususnya mitra statistik tidak lagi mudah karena biaya transport yang dibayarkan dari ibu kota kecamatan bukan dari desa tempat tugas dan honor pelatihan sangat rendah dibandingkan dengan instansi lain.	Agar biaya transport dibayarkan sesuai dengan tempat tugas karena di Kabupaten Kolaka masih ada beberapa daerah sulit, dan biaya latihan disesuaikan dengan biaya minimum regional yang berlaku serta upah pencacahan agar ditinjau kembali.	Penyelenggara pelatihan di daerah agar mengatur secara bijaksana sesuai ketersediaan data
9.	Biaya Pencacahan sering terlambat	Untuk kegiatan sensus/survei dan menggunakan mitra diharapkan agar dana pencacahan dikirim	BPS daerah agar menyampaikan kondisi yang ada saat melakukan rekrut-men petugas, karena cairnya

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
		secara bertahap untuk mengantisipasi uang muka kerja, Karena sebagian besar mitra bukan PNS dan sudah pasti sangat mengharapkan dana harian.	dana diluar kemampuan BPS
	<u>Kabupaten Buton</u>		
10.	Biaya yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan Statistik Sosial sangat minim, contoh : biaya kegiatan Susenas, Sakernas dan lain-lain.	Dana/anggaran perlu ditingkatkan.	Selalu diusahakan tetapi terbentur keterbatasan dana yang diberikan pemerintah
11.	Dropping dokumen pelaksanaan kegiatan Statistik Sosial dari BPS sering terlambat dikirim ke kabupaten.	Dropping dokumen pelaksanaan kegiatan Statistik Sosial dari BPS sering terlambat dikirim ke kabupaten.	Sudah kita antisipasi, sepanjang budget tersedia
	<u>Kota Kendari</u>		
12.	Biaya pelaksanaan Sakernas/Susenas masih sering terlambat di drop dari BPS Provinsi,	Biaya pelaksanaan Sakernas dan Susenas diharapkan dapat segera di drop setelah selesai pelaksanaan lapangan, mengingat petugas lapangan kebanyakan dari pihak luar/mitra.	Mitra agar diinformasikan sebelumnya karena cairnya dana diluar kemampuan BPS untuk mempercepatnya
13.	Pelaksanaan Survei Upah sering terlambat disebabkan oleh kesibukan Direktur Perusahaan.	Frekuensi kunjungan ke setiap perusahaan agar ditingkatkan dengan konsekuensi anggaran pencacahan dinaikan.	Akan diusahakan, namun disesuaikan dengan anggaran pemerintah.
14.	Hasil kegiatan Registrasi Penduduk hasilnya kurang memuaskan.	Perlu adanya <i>refreshing</i> bagi aparat kelurahan khususnya dalam menangani Registrasi Penduduk.	
	<u>Kabupaten Kendari</u>		
15.	Pencatatan Registrasi Penduduk belum teratur.	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu diperbaharui kembali instruksi bersama antara Depdagri dan BPS. - Perlu penekanan keseragaman konsep dan definisi tentang kependudukan, - Perlu dipertimbangkan biaya pengumpulan data. 	Sedang dipersiapkan Keppres baru tentang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Penduduk dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
16.	Pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Penduduk Berkelanjutan (P4B) mengalami	Agar jadual pendataan diperpanjang.	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	keterlambatan.		
17.	<p>Pelaksanaan P4B :</p> <p>a. Jumlah petugas PDL; FML sangat terbatas, sementara letak/jarak antara desa yang satu dengan yang lainnya berjauhan dan sarana transportasi sangat sulit.</p> <p>b. Musim hujan sangat mempengaruhi petugas di lapangan.</p> <p>c. Cakupan materi dalam kuesioner cukup banyak yang sifatnya individual (KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Colongan Darah). Petugas PDL mendatangi rumah tangga berulang kali sehingga membosankan responden dan melelahkan petugas.</p> <p>d. Ada penduduk yang tidak bersedia didata dengan alasan data yang ditanyakan dalam kuesioner sangat rahasia untuk keluarga.</p>	<p>Agar diberi kesempatan/waktu yang cukup untuk pemeriksaan daftar isian dokumen yang masuk.</p>	
18.	Jumlah dokumen KPU-KL, KPU-SD dan stiker tidak mencukupi kebutuhan.	Tambahan dokumen secepatnya dikirim ke daerah.	
19.	Karena luasnya cakupan materi dalam kuesioner sedangkan waktunya hanya satu bulan dan ketatnya pengawasan dibanding dengan biaya yang diterima relatif kecil akhirnya PDL mengundurkan diri.	Agar waktu diperpanjang dan biaya transport petugas perlu dibantu terutama untuk daerah sulit dan saling berjauhan.	
75. Gorontalo			
1.	Tabulasi rinci SUSENAS 2002 dan raw data tidak	Mohon BPS dapat mengirimkan Tabulasi Rinci dan raw data	Diusahakan secepatnya dikirimkan

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	tersedia di BPS Provinsi Gorontalo	dimaksud ke BPS Provinsi Gorontalo untuk kebutuhan di daerah	
2.	Kegiatan Statistik Rutin : PN1 / PN2, LP1 dan LP2, Registrasi Sekolah Non Diknas dan Registrasi Penduduk belum dapat dilaksanakan karena dokumennya tidak tersedia.	Mohon pengadaan dokumennya ke BPS Provinsi	
3.	Data SUSENAS sulit untuk diserieskan setiap tahun karena datanya kurang baik.	Sistem pelaksanaan pencacahan dan pemeriksaan / pengawasan apa bisa dilakukan dengan cara terpadu ke lapangan seperti pelaksanaan SDKI.	
81. Maluku			
1.	Sampai saat ini permintaan dokumen Registrasi Penduduk dengan surat kami nomor: 81521.002 tanggal 28 Januari 2003 belum direalisasi BPS. Apakah kegiatan pencacahan penduduk dengan Registrasi Penduduk masih tetap dilakukan ?	Mohon petunjuk dari BPS menyangkut hal ini.	
82. Maluku Utara			
1.	Ada PDL yang telah mengikuti latihan tapi saat pelaksanaan lapangan mengundurkan diri.	Diganti oleh petugas dari desa yang sama (yang kurang beban tugasnya) dan atau ditangani langsung oleh staf kabupaten/kota.	
2.	Jumlah lembar KPU-KL dalam satu boks tidak mencukupi 100 lembar.	Ditambah sehingga mencukupi 100 lembar, namun resikonya untuk BS lain tidak ada dokumennya.	
3.	Jumlah dokumen yang dialokasi dari KPU Pusat tidak mencukupi (kekurangan dokumen). ❖ KPU-KL ❖ KPU-SD ❖ Stiker	Dilaporkan ke Sekretariat P4B-BPS dan KPU Pusat Melalui Surat dan telepon. ❖ Membuat blanko pembantu ❖ Dibuat sendiri dengan menggunakan kertas komputer berkarbon. ❖ Tetap jalan tanpa penempelan stiker pada bangunan tersebut.	
4.	Dokumen P4B susulan/tambahan, kualitasnya meragukan. Dalam setiap boks kurang lebih 25 lembar	Mengingat terbatasnya dokumen, disarankan lembar KPU-KL tersebut tetap digunakan dilapangan. Dan pada akhir pelaksanaan apabila ada kelebihan	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	KPU-KL yang tidak dapat digunakan karena cetakan pertanyaannya ada di dalam kotak isian. PODES ST2003 Berdasarkan Perda terakhir, jumlah desa/kelurahan di Provinsi Maluku Utara 743 desa/kelurahan. Namun realisasi pencacah Podes ST2003 hanya 742 desa/kelurahan, karena desa Loleba (Kecamatan Wasile) menurut Perda adalah desa definitif namun dilampiran belum ada perangkat desanya.	dokumen KPU-KL maka akan disalin kembali isiannya ke blonko KPU-KL yang baru (sempurna). Pencacah Podes dari Desa Loleba digabung dengan desa induknya (Waijoi, Kec. Wasile).	
6.	Ada PCL dari Kota Ternate yang menggundurkan diri setelah mengikuti pelatihan	Dilaksanakan oleh staf BPS Kota Ternate.	
7.	Ada beberapa isian Susenas yang seharusnya diisi tetapi malah kosong, seperti tahun berhenti sekolah setelah tahun 1993.	Dikonfirmasikan kembali ke PCL walaupun kadang-kadang hasil baliknya terlambat.	
8.	PENGOLAHAN SUSENAS 2003 Tahun berhenti sekolah tahun 2000 dan 2001 pada blok V.c R13 (kotak tahun) diisi 00 dan 01 tidak jalan.	Supaya proses entry nya lancar, maka pada blokV.c R.13 (kotak tahun) diisi 20 dan 21.	
9.	Balita yang umur > 12 bulan seharusnya pada Blok V.B R.11.c tidak perlu ada isian, namun kadang-kadang program nya minta supaya ada isian (1 atau 2). Begitu pula pada Blok VIII.R.3a (beasiswa) apabila tidak ada ART yang bersekolah seharusnya dari R.2 lanjut ke R.4 tapi kadang-kadang minta harus diisi.	Supaya proses entry nya lancar, maka pada rincian-rincian tersebut (blokV.B R.11c dan blok VIII R.3a) diisi kode 2 (tidak).	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Pemasukkan Dokumen Susenas 2003 dari Kabupaten/Kota terlewat (tdk sesuai dengan jadwalnya).	<ul style="list-style-type: none"> - Selalu diingatkan ke BPS Kabupaten/Kota dengan surat dan telepon. - Staf BPS Kab/Kota atau Propinsi menjemput langsung dokumen di desa/kecamatan. 	
11.	REGISTRASI PENDUDUK <ul style="list-style-type: none"> - Blanko untuk pengumpulan data registrasi penduduk tahun 2001-2002 belum dikirim dari BPS 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengantisipasinya, BPS Propinsi telah memperbanyak blanko tersebut dengan fotocopy. - Mohon untuk selanjutnya dapat dikirim ke daerah sesuai jadwal. 	
12.	PARAMETER DEMOGRAFI <ul style="list-style-type: none"> - Data Parameter Demografi seperti TFR, IMR, CBR, CDR per Kab/Kota setiap tahun sangat dibutuhkan Pemda dan Instansi terkait. - Tidak tersedianya software kependudukan dan data mentah, sehingga menyulitkan daerah dalam mengestimasi indikator-indikator kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selain tabel hasil, bisakah BPS juga menyampaikan kepada kami raw data setiap kegiatan agar kami dapat menghitung parameter-parameter tersebut. - Perlu pengadaan software kependudukan di daerah (kab/kota dan propinsi) 	
13.	IPM <ul style="list-style-type: none"> - Angka IPM dan Angka Kemiskinan per Kabupaten / Kota sangat dibutuhkan Pemda dan Instansi terkait. Tidak ada tenaga yang dapat menghitungnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon adanya pelatihan untuk menghitung angka IPM maupun penduduk miskin bagi Propinsi baru. 	
14.	Pelaksanaan Kegiatan rutin Hansos (PN1, PN2, LP dan Keajaiban) <ul style="list-style-type: none"> - Sering laporannya tidak pernah disampaikan ke BPS Kab/Kota atau BPS Propinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya konfirmasi tingkat pusat sebab BPS daerah tidak mungkin mengevaluasi Instansi yang ada. - Antisipasinya BPS Propinsi memperbanyak dengan fotocopy. 	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Blanko laporan untuk tahun 2002 belum kami terima di Propinsi.	- Blonko untuk tahun 2002 mohon disampaikan ke BPS Propinsi dalam waktu yang tidak terlalu lama.	
15.	PELATIHAN BIDANG SOSIAL - Untuk menterjemahkan berbagai indikator - indikator sosial kepada pihak lain, perlu adanya pemahaman terhadap indikator tersebut. Yang menjadim masalah adalah bahwa tenaga yang pernah mengikuti pelatihan penghitungan dan analisa bidang sosial belum ada di Propinsi (Maluku Utara).	- Perlu BPS memikirkan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan demografi, pelatihan penghitungan penduduk miskin, pelatihan penghitungan IPM dan analisa bidang sosial bagi BPS Kab/Kota dan BPS Propinsi.	
91. Papua			
1.	Perubahan Sampel Susenas 2003 yang terlambat diinformasikan ke daerah, sehingga ada Kabupaten yang terlanjur mencacah berdasarkan alokasi sampel awal, maka perlu diperhitungkan kelebihan biaya pencacahan tersebut.	Permasalahan ini diserahkan ke Subjek meter BPS Pusat untuk penyelesaian biayanya.	Kekeliruan tersebut sudah disampaikan melalui surat Sestama sebelum pencacahan, mengapa tetap daerah? Hal ini disebabkan kebijaksanaan pimpinan BPS
2.	Hasil Pengolahan susenas dan survei lain yang dilakukan dipusat agar segera dikirim ke daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk keperluan di daerah.	Disampaikan ke Pusat untuk tanggapannya.	Biasanya langsung diberikan kepada Kabid Sosial setelah data siap
3.	Kurangnya SDM untuk analisis Kependudukan karena staf yang pernah dilatih di BPS telah dimutasi	Perlu diadakan Pelatihan Analisis Kependudukan baik staf di Provinsi maupun di setiap Kabupaten/Kota, se-Papua.	Akan dikaji pembinaan teknis bidang/seksi sosial secara berkala.
4.	Alokasi Dana P4-B yang tersedia tidak sesuai	Diserahkan ke pihak BPS Pusat untuk diketahui	

No	Permasalahan	Saran Pemecahan oleh BPS Prov	Keputusan BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	dengan jumlah penduduk Papua Kurangnya staf sehingga ada beberapa seksi yang tidak mempunyai bawahan/staf	Diserahkan ke pihak BPS Pusat untuk diketahui	Daerah dapat menominasikan tamatan STIS yang sudah memenuhi syarat untuk mengisi jabatan yang kosong
6.	Setiap Proyek Kerjasama BPS Pusat dengan instansi lain yang diselenggarakan di daerah agar diperhitungkan biaya operasional untuk BPS di daerah/BPS Provinsi	Diserahkan ke pihak BPS Pusat untuk dipikirkan	